



TBNews



TRIBRATA **AKTUAL & FAKTUAL**



SATYA HAPRABU



08 LAPORAN
UTAMA

MENGEMBALIKAN
KEPERCAYAAN
PUBLIK

20 KASUS

KEADILAN UNTUK
TRAGEDI
KANJURUHAN

62 BUNGA
RAMPAI

PERUBAHAN
RADIKAL ITU DATANG
DARI JALANAN

78 VIRAL

NIAT BAIK
YANG DITUDUH
PENCITRAAN

MEMBUKA RUANG TRANSPARANSI PUBLIK



 DIVISI HUMAS POLRI
  DIVISIHUMASPOLRI
  DIVHUMAS_POLRI
  @DIVHUMAS_POLRI



Pelindung
KAPOLRI, WAKAPOLRI

Penasehat
KADIVHUMAS POLRI

Ketua Pengarah
KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA

Staf Ahli
PARA KABAG DIVHUMAS POLRI

Pemimpin Redaksi
KOMBES POL. HENDRA ROCHMAWAN, S.I.K., M.H.

Staf Redaksi
AKBP Drs. SUWANDA, M.Si.
AKBP AHMAD DHARMIANTO, S.H., S.I.K.
PENATA PIPIET RATRIE KURNIA YANTIE, S.Kom.
IPTU DITA PRIMA JUWITA, S.I.Kom.
IPDA NIFRINAS YULISTIN RIZKY., S.I.Kom
PENDA HARYATI, A.Md.
BRIPTU AMANDA
BRIPDA ALDI RASYID

ART DIRECTOR
AGUNG SUPRIYANTO WIDADI

Fotografer
BAG PRODDOK
DIVHUMAS POLRI

Penerbit
BAG PENSAT
DIVHUMAS POLRI

Kontributor
SATKER MABES/SATWIL POLDA

Percetakan
PT Buana Inti Sejahtera

Alamat Redaksi
Bag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri
Jalan Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7218141, 7218770
Faks. (021) 7260208, 7218141

Redaksi Majalah **Tribrata News** menerima kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.
E-mail: pensat.divhumas@gmail.com

E D I T O R I A L

Optimisme

Kepuasan publik terhadap citra polisi dalam beberapa waktu terakhir memang mengkhawatirkan. Survei yang dihelat Litbang Kompas pada periode 24 September hingga 7 Oktober 2022, kepuasan publik terhadap penegakan hukum berada di angka 51,5 persen.

Kepuasan itu jatuh 6 persen dibandingkan hasil survei yang sama pada Juni 2022 sekaligus menjadi yang terburuk sejak Oktober 2019. Dalam rentang tiga bulan, citra baik Polri tergerus sangat 'dalam' hingga mencapai 17 persen.

Rendahnya kepuasan publik di bidang penegakan hukum tersebut selaras dengan citra lembaga-lembaga terkait, yakni Polri, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Kejaksaan.

Padahal semua tindakan yang dilakukan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mulai dari memotong kepala ikan jika ada ekornya yang busuk, memecat, menunda kenaikan pangkat bahkan menurunkan jabatan atau mendemosi sudah dilakukan.

Bahkan tak tanggung-tanggung, personel Polri yang tidak bisa mengikuti komitmen dan semangat yang sama dipersilahkan keluar dari Korps Bhayangkara.

Perbaikan memang butuh kemauan keras dan tekad baja karena publik meyakini bahwa cita-cita luhur menjadi polisi bermula dari niat dan gagasan membantu masyarakat kecil.

Jenderal Hoegeng Imam Santoso pernah membuat perumpamaan, pemerintahan yang bersih harus dimulai dari atas. Seperti halnya orang mandi, guyuran air untuk membersihkan diri selalu dimulai dari kepala.

Optimisme itu tetap harus dijaga oleh para pimpinan dari mulai para Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek untuk memberi suri tauladan dan contoh yang baik. Bawahan pasti akan mengikuti jejak para pimpinannya.

Inilah mengapa seluruh Kapolda, Kapolres dari 34 polda dan jajaran berkumpul di Ibu Kota karena panggilan dari Istana Presiden. Pejabat utama Polri, dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadap presiden.

Tak ada tongkat komando, tak ada penutup kepala, serta tak ada mobil dinas pejabat utama Polri, Kapolda, dan Kapolres yang dibawa. Hanya Kapolri dan para perwira tinggi bintang tiga yang boleh datang dengan kendaraan dinas dengan akses masuk Istana melalui pintu 1 Jalan Veteran.

Kapolri menjelaskan pada pertemuan tersebut Presiden berkenan memberikan petunjuk dan arahan dalam menjalankan tugas. Presiden Jokowi mengutarakan dirinya ingin ada kesamaan visi dalam Polri. Di mana kepemimpinan harus bijaksana dan tak gamang. [*]



08 laporan **UTAMA**

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Jumat, 14 Oktober 2022 menjadi hari yang tak biasa bagi institusi Polri. Seluruh kapolda, kapolres dari 34 polda dan jajaran berkumpul di Ibu Kota karena panggilan dari Istana Presiden. Pejabat utama Polri pun, dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, wajib hadir.

20 KASUS

- KEADILAN UNTUK TRAGEDI KANJURUHAN



R. Soemarto, Penggagas Lahirnya Mobrig

34 INOVASI

- ETL E DRONE, PENEGAKKAN HUKUM DARI UDARA

62 BUNGA RAMPAI

- PERUBAHAN RADIKAL ITU DATANG DARI JALANAN

42 UNGGULAN

- BERKUBANG LUMPUR BHABINKAMTIBMAS DAERAH TERPENCIL

78 VIRAL

- NIAT BAIK YANG DITUDUH PENCITRAAN



Foto Cover : istimewa

Korps Bhayangkara
SIAP AMANKAN
Presidensi G20

DIVISI HUMAS POLRI
 DIVISIHUMASPOLRI
 DIVHUMAS_POLRI
 @DIVHUMAS_POLRI

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meminta masyarakat untuk menjaga stabilitas politik agar tetap kondusif dengan menghindari hal-hal yang bersifat polarisasi. Menurut Kapolri stabilitas menjadi modal bangsa menuju Indonesia Emas 1945 siapapun yang menjadi pemimpin pada Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Kapolri di sela kunjungannya ke sejumlah ulama pengasuh pondok pesantren di Rembang, Jawa Tengah, Minggu 30 Oktober 2022.

“Menjelang tahun politik, mari hilangkan hal-hal yang bersifat polarisasi. Untuk itu, Polri butuh ulama tentunya berbagai kegiatan kita harus terus kerja sama untuk mendinginkan situasi,” kata Kapolri.

Rangkaian silaturahmi Kapolri tersebut salah satunya dengan berkunjung ke Kiai Bahaudin Nursalim



(Gus Baha). Kemudian, dilanjutkan ke Pondok Pesantren Kauman Lasem, Rembang untuk bersilaturahmi dengan Kiai Muhammad Zaim Ahmad Ma'shoem (Gus Zaim) serta 50 kiai dari berbagai daerah. [*]



Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menegaskan pentingnya menjaga dan merawat semangat sumpah pemuda yang digelorkan para pahlawan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan orasi kebangsaan terkait momentum peringatan Sumpah Pemuda

di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

“Jadi baru saja saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi orasi kebangsaan terkait dengan makna dan memaknai Sumpah Pemuda. Tentunya di dalam kegiatan ini kita mengingatkan kembali sejarah perjalanan bangsa dari zaman penjajahan sampai tantangan ke depan yang kita hadapi,” kata Kapolri, Sabtu 29 Oktober 2022.

Refleksi dari peringatan tersebut, menurut Kapolri adalah bagaimana terus mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan.

Persatuan dan kesatuan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh elemen harus bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan ke depan. [*]

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengingatkan taruna lulusan Prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian Tahun 2022 tentang pentingnya soliditas TNI-Polri untuk menjamin stabilitas kemandirian dan politik.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam upacara Wisuda Prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akp) Tahun 2022 di Magelang, Jawa Tengah, Senin, 31 Oktober 2022.

“Hal tersebut sejalan dengan penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa kalau dilihat Polri solid, kemudian bergandengan dengan TNI solid, saya memberikan jaminan, stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita pasti akan baik,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan sebagai langkah untuk memupuk soliditas dan sinergi TNI-Polri sejak dini maka TNI dan Polri telah membuat nota kesepahaman untuk menyelenggarakan Pendidikan



Dasar Integratif Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian.

Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2026 ketika para taruna menyelesaikan pendidikan akan melahirkan sosok-sosok perwira TNI-Polri yang mampu berjuang bersama dalam rangka mempererat kebhinekaan guna mewujudkan Indonesia Maju. [*]



Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menerima kunjungan tujuh mantan Kapolri yang menyampaikan sejumlah saran dan nasihat memimpin Polri menghadapi ‘badai beruntun’ beberapa waktu terakhir.

Ke tujuh mantan Kapolri tersebut di antaranya yakni Roesmanhadi, Chairudin Ismail, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo dan Badrodin Haiti.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan terima kasih terhadap dukungan yang diberikan para mantan Kapolri tersebut.

“Terima kasih Pak atas dukungan moril kepada kami semua. Dan kami adik-adik bapak, sangat senang,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Jumat 28 Oktober 2022.

Ditambahkannya hasil pertemuan tersebut bakal memperkaya langkah perbaikan di internal Korps Bhayangkara baik dalam jangka pendek ataupun menengah. [*]



SATYA HAPRABU

Korps Bhayangkara harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Polri yakni pelindung, pengayom, pelayan masyarakat.

TRUST

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Jumat, 14 Oktober 2022 menjadi hari yang tak biasa bagi institusi Polri. Seluruh Kapolda, Kapolres dari 34 polda dan jajaran berkumpul di Ibu Kota karena panggilan dari Istana Presiden. Pejabat utama Polri pun, dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, wajib hadir.

Tak ada tongkat komando, tak ada penutup kepala, serta tak ada mobil dinas pejabat utama Polri, Kapolda, dan Kapolres yang dibawa. Hanya Kapolri dan para perwira tinggi bintang tiga

yang boleh datang dengan kendaraan dinas dengan akses masuk Istana melalui pintu 1 Jalan Veteran.

Selain itu, para polisi yang diundang juga tak boleh membawa handphone atau alat komunikasi elektronik lainnya. Mereka yang diundang ke Istana Presiden hanya boleh membawa kertas dan pulpen.

Selepas salat Jumat, tepatnya pukul 14.00 WIB, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 559 perwira Polri yang hadir.

“Bapak Presiden berkenan memberikan petunjuk dan arahan tugas kami dalam menjalankan tugas,” ujar Jenderal Sigit.

Presiden Jokowi, yang duduk sebaris dengan Menko Polhukam Mahfud Md dan Jenderal Sigit di depan 559 perwira Polri, pun melangkah ke podium kecil. Dia lalu memberikan 7 poin arahan, untuk segera diimplementasikan oleh Polri dan jajarannya.

Mantan Gubernur DKI tersebut pertama-tama menyoroti keluhan



“Visi presisi, Pak Kapolri, saya minta juga jangan njimet-njimet. Tolong disederhanakan. Sehingga yang di bawah itu ngerti apa yang harus dijalankan,”

Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo

masyarakat pada Polri terkait pungutan liar, arogansi, sikap-sikap mencari kesalahan masyarakat serta gaya hidup mewah. Kemudian, Presiden Jokowi menekankan jangan sampai rasa aman dan nyaman masyarakat terhadap Polri hilang, bahkan berkurang.

“Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini (pungli),” kata Presiden. “Mencari-cari kesalahan,” ujar Presiden lagi.

Presiden meminta Polri merespons hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, sekecil apapun. Poin ini menegaskan arahan Presiden Jokowi agar Polri lebih melayani masyarakat.

Selanjutnya adalah Presiden Jokowi

menyadarkan Polri bahwa Indonesia memasuki tahun politik. Soliditas internal harus diwujudkan, kemudian dilanjut dengan sinergitas bersama TNI.

“Ini sudah masuk tahun politik karena tahun pemilu sudah masuk sejak Juni. Harus ditunjukkan soliditas di Polri dulu, (setelah) rampung, baru soliditas Polri dan TNI. Harus ada kepekaan. Posisi politik ini seperti apa sih karena saudara-saudara pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing, sense politiknya harus ada,” ucap Presiden Jokowi.

“Tidak bermain politik tetapi ngerti masalah politik karena kita akan masuk tahun politik. Kalau dilihat Polri solid kemudian bergandengan dengan TNI solid, saya bolak-balik menyampaikan,

• saya memberikan jaminan stabilitas
• keamanan kita, stabilitas politik kita
• pasti akan baik. Nggak ada yang berani
• coba-coba, kalau coba-coba ya tegas
• saja,” sambung Presiden Jokowi.

Kesamaan Visi

Presiden Jokowi lalu mengutarakan dirinya ingin ada kesamaan visi dalam Polri. Di mana kepemimpinan harus bijaksana dan tak gamang. Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta agar visi Polri Presisi dilanjutkan, meski dengan catatan, konsep tersebut harus mudah dipahami oleh seluruh anggota.

“Visi presisi, Pak Kapolri, saya minta juga jangan njimet-njimet. Tolong disederhanakan. Sehingga yang di bawah itu ngerti apa yang harus

dijalankan,” tutur Presiden Jokowi.

“Apa sih kalau disederhanakan? Ya tadi, yang Kapolri sampaikan tadi: Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan masyarakat. Intinya ke sana. Presisinya tuh apa, jelasin, sekali lagi, secara sederhana dan jelas. Sehingga gampang ditangkap visi itu,” tambah Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengarahkan agar Pemerintah maupun Polri tak dianggap lemah dalam penegakan hukum. Sehingga tak ada kata mundur dalam pemberantasan praktik-praktik kejahatan yang meresahkan seperti judi dan narkoba.



Lalu, Presiden Jokowi meminta Polri meningkatkan kemampuan komunikasi publik karena di era media sosial, setiap peristiwa bisa tersebar luas dalam jangka waktu singkat. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai suatu peristiwa harus dilakukan dengan baik, cair, namun tepat sasaran.

Presiden Jokowi juga meminta Polri menjalin kerja sama dengan pemda untuk menanggulangi dampak negatif dari krisis ekonomi global. Kerja sama yang dimaksud, di antaranya adalah

soal harga pangan dan inflasi.

Gaya Hidup

Dalam pengarahannya tersebut Presiden Jokowi menyoroti gaya hidup Polri. Dia meminta pejabat Polri mengerem untuk tidak mewah. Awalnya, Jokowi mengatakan saat ini 66 negara sedang berada di posisi rentan. Saat ini, kata Jokowi, 345 juta orang di 82 negara negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut.

"Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu, keadaan

situasi ini harus ngerti sehingga punya sense of crisis yang sama, hati-hati dengan ini, hati-hati," ujar Presiden Jokowi dalam pengarahannya itu.

Kemudian Presiden Jokowi menyoroti masalah gaya hidup Polri. Dia meminta mereka 'ngerem' dalam masalah gaya hidup. Dia pun meminta anggota Polri tidak gagah-gagahan dengan barang-barang miliknya.

"Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus, atau motor gede yang bagus, hati-hati. Saya



“

Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus, atau motor gede yang bagus, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati,

”

ingatkan hati-hati," lanjutnya.

Presiden Jokowi mengatakan di era saat ini Polri tidak bisa lagi menutup-nutupi masalah gaya hidup. Jokowi mengatakan era saat ini sudah terbuka karena ada media sosial. Presiden Jokowi mengungkapkan dia menerima banyak laporan soal gaya hidup polisi.

Dia menekankan hal seperti gaya hidup juga mempengaruhi indeks kepercayaan publik pada Polri.

"Saya terlalu banyak terima laporan, sehingga kembali lagi gaya hidup, urusan kecil-kecil tapi bisa

mengganggu kepercayaan polri. Urusan mobil, urusan motor gede, urusan remeh temeh, sepatu apa, bajunya apa, dilihat masyarakat saat ini, itu yang kita harus ngerti dalam situasi dunia yang penuh keterbukaan dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri semuanya," tutur Presiden Jokowi. [*]

GEBRAKAKAN DAN CATATAN-CATATAN PERBAIKAN



Larang Tilang Manual

Jenderal Sigit menginstruksikan larangan tilang manual. Instruksi itu ditujukan untuk ke seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Instruksi larangan tilang manual dituangkan dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, yang terbit 18 Oktober 2022. Surat telegram itu ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Jajaran Korlantas diminta memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik atau ETL, baik statis maupun mobile.

Masih dalam surat telegram yang sama, personel Korlantas Polri juga diminta memberikan pelayanan prima serta menerapkan 3S (senyum, sapa, dan salam) saat memberikan pelayanan mulai dari sentra loket Samsat, Satpas, penanganan kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas. Kapolri juga meminta seluruh anggota Polantas di lapangan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) khususnya di lokasi blackspot dan troublespot. Selain itu, agar melaksanakan kegiatan, pendidikan masyarakat

lalu lintas (dikmas lintas) untuk meningkatkan kamseltibcarlantas serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Larangan tilang manual bertujuan untuk meniadakan ruang pungutan liar (pungli) dengan modus penindakan terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

Buat Survei Indeks Kepuasan Layanan Publik Polri

Jenderal Sigit meminta fungsi Polri yang tugasnya berkaitan dengan pelayanan publik, membuat indeks



kepuasan. Survei kepuasan yang dimaksudnya seperti yang ada di bank. Bahkan, sambungnya, di setiap kantor pelayanan kepolisian dilakukan survei kepuasan publik. Dia mengibaratkan kantor pelayanan publik kepolisian seperti toko atau bank.

"Kalau perlu di setiap pelayanan ada survei kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana membuat masyarakat yang menerima pelayanan kepolisian itu, kita buat seolah-olah kalau (ibarat) toko, bank, bagaimana supaya pelanggan itu datang dan tertarik kembali," kata dia.

Hilangkan Budaya 'Setoran', Ketahuan-Copot!

Jenderal Sigit mengancam akan mencopot personelnya yang terlibat 'setoran'. Sigit menegaskan 'setoran' ini membuat terjadinya pungutan liar (pungli). 'Setoran' yang dimaksud adalah pemberian uang oleh anggota kepada komandan atau atasannya. Kapolri menegaskan perilaku ini harus ditiadakan.

Kapolri lalu mengungkap motivasi bawahan menyetorkan uang ke atasan dengan harapan mendapatkan

kesempatan sekolah atau jabatan yang lebih baik. Sigit pun menegaskan akan menangkap pihak-pihak yang mencatat namanya untuk iming-iming sekolah dan jabatan.

"Tidak ada untuk menempatkan jabatan, harus bayar. Tidak ada untuk supaya seseorang bisa sekolah, harus bayar," imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Dia menegaskan nama-nama polisi yang mendapatkan jabatan atau sekolah dengan cara 'setoran' akan dibatalkan promosinya dan dicopot dari jabatan.



Fasilitasi Masalah Rumah Ibadah

Masih kata Jenderal Sigit, jajaran Polri diminta cepat tanggap menghadapi persoalan rumah ibadah. Jenderal Sigit menuturkan persoalan rumah ibadah di satu tempat berpotensi diviralkan dan berdampak ke wilayah lain.

Jenderal Sigit menjelaskan Polri harus bekerja sama dengan pemda. Jika pemda tak memberi fasilitas untuk penyelesaian masalah, mantan Kabareskrim Polri ini memerintahkan

jajarannya memfasilitasi dan turut berkoordinasi dengan TNI.

"Ini bagaimana bekerja sama dengan pemda, saya kira aturan sudah jelas dalam situasi-situasi tertentu, maka pemda harus memfasilitasi. Kalau pemda tidak bisa memfasilitasi, maka kita yang memfasilitasi atau paling tidak bersama dengan teman-teman dari TNI," tegas Jenderal Sigit.

Peserta Uji SIM Dapat 2 Kali Kesempatan

Jenderal Sigit lalu memerintahkan agar praktik ujian SIM diberi dua kali

kesempatan di hari yang sama. Hal ini, katanya, agar tak memakan waktu banyak. Sigit juga mengusulkan agar peserta pembuatan SIM diberi pelatihan dulu sebelum menjalani ujian.

Tak Boleh Menghindar saat Diminta Update Kasus

Jenderal Sigit mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat tentang polisi yang menghindar saat dimintai informasi perkembangan kasus. Jenderal Sigit menuturkan aduan itu tak hanya diterima olehnya, tapi juga oleh Propam Presisi dan Dumas Presisi.

Dia menuturkan ini bagian dari ujian komitmen transparansi.

Jenderal Sigit meminta polisi dapat menjelaskan perkembangan kasus secara scientific dan diterima nalar publik. Jenderal Sigit juga meminta pemanfaatan teknologi dilakukan dalam hal menginformasikan perkembangan kasus yang ditangani kepolisian.

Dia menegaskan kepada jajaran agar tak menghindari pertanyaan masyarakat. Mantan Kapolda Banten ini menyebut penjelasan yang diberikan pada masyarakat harus jelas dan dipahami.

Tak Lemah ke Mafia Judi-Narkoba dan Migas

Catatan selanjutnya adalah Polri dan jajarannya tak boleh lemah dalam memberantas narkoba dan judi. Jenderal Sigit juga menyebut keberadaan premanisme, aksi debt collector, tawuran, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga investasi bodong harus diberantas.

“Yang tentunya menjadi keluhan masyarakat banyak, layani dengan baik!” tegas Jenderal Sigit.

Peringatan keras juga ditujukan kepada seluruh personel Polri untuk tidak main mata terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang minyak dan gas (migas). Sigit meminta distribusi, stok serta harga BBM dan elpiji dipelototi, sehingga tidak membuat masyarakat semakin resah dan susah.

“Jadi apa yang menjadi sorotan, apalagi yang menjadi beban pemerintah saat ini, terkait dengan harga BBM. Upaya mengalihkan bantalan sosial ke tempat lain, sehingga mau tidak mau kita harus mengawasi betul yang namanya BBM, elpiji,” tegas Sigit.

“Jangan sampai kemudian ini masih menjadi keluhan masyarakat. Karena di satu sisi pemerintah melakukan langkah-langkah, namun di sisi lain kita ngerti, namun kita biarkan. Apalagi kemudian kita ‘main mata’, ini diakhiri,” tegas Sigit lagi.

Akses Publik Dapat Layanan dan Keadilan Dipermudah

Pun untuk akses layanan publik dan upaya publik mencari kepastian hukum, Jenderal Sigit memerintahkan jajaran Polri di seluruh Tanah Air untuk jajaran bekerja cepat dan tak mempersulit persoalan.

“Sekali lagi, hal yang bisa kita permudah, jangan kita persulit,” ucap Jenderal Sigit.

Sigit menekankan lagi soal tampilan personel Polri yang perlu diubah, dari kesan arogan menjadi kesan humanis dan sopan.

“Kedepankan pendekatan-pendekatan rekan-rekan yang humanis. Tampilkan etika dan kesopanan, tutur katanya juga lembut, namun tegas ketika dibutuhkan,” sambung Sigit.

Tak Pamer Harta

Lalu soal perilaku pamer harta, Jenderal Sigit ingin hal itu dihilangkan.

Dia meminta jajarannya menyesuaikan penampilan dan menyingkirkan ego. Misalkan bagi para Kapolres, jika bupati memakai kendaraan Toyota Innova, maka pakailah kendaraan yang setara.

“Sehingga kemudian kita tidak terlihat mencolok karena berbeda, dan itu dianggap menjadi hal-hal yang kemudian dianggap hedonis, memang sulit tapi harus kita lakukan,” tambahnya.



Pemurnian Emas

Untuk membuat jajaran paham dengan kondisi Polri saat ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan suatu perumpamaan. Pembenaan internal ibarat proses pemurnian emas, Polri saat ini sedang diayak dan disaring untuk menjadi emas murni.

Jenderal Sigit berharap semua anggota kepolisian bisa menjadi emas murni tersebut. Sigit meminta semua jajarannya menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga semua jajaran Polri bisa sejajar.

“Ibarat proses pemurnian emas, Polri saat ini sedang diayak dan disaring untuk menjadi emas murni berkadar 24 karat. Harapan saya, tentunya kawan-kawan semua masuk dalam bagian yang bertahan dan bisa menjadi emas yang 24 karat itu,” kata Sigit.

Sigit lalu meminta jajarannya bahu-membahu menghadapi situasi bangsa, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Mari kita semua bahu-membahu dalam menghadapi situasi bangsa khususnya dalam bidang kamtibmas,” pungkask dia. [*]



KEADILAN

UNTUK TRAGEDI KANJURUHAN

Awal Oktober 2022 merekam sejarah kelam dunia persepakbolaan. Bukan hanya di Tanah Air, namun hingga ke seluruh dunia. Penghormatan dan empati diberikan kepada 125 orang yang meninggal dunia karena kekacauan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Jumlah korban meninggal dunia, hingga Senin 24 Oktober 2022 bertambah menjadi 135 orang.

Sedari awal peristiwa terjadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat utama Polri langsung memberi atensi penuh dan terbang ke Malang. Kurang dari 24 jam, pucuk pimpinan Polri beserta jajaran hadir di tengah para korban dan keluarga korban.

Kunjungan Sang Jenderal tak sekadar untuk meninjau langsung kondisi Stadion Kanjuruhan dan para korban. Kehadirannya membawa janji akan keadilan.

"Karena begitu besarnya saudara kitayang meninggal, maka kami bersama tim akan melaksanakan pengusutan terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan. Kami akan melakukan investigasi terkait peristiwa yang terjadi, yang menyebabkan banyaknya korban meninggal," ujarnya di depan awak media, Minggu malam 2 Oktober 2022.

Jenderal Sigit juga memaksimalkan peran Disaster Victim Identification (DVI) untuk percepatan proses identifikasi korban. Dia juga terjun langsung untuk



mengawasi proses penyelidikan Tragedi Kanjuruhan, hingga ditetapkannya 6 tersangka, termasuk anggota Polri yang berperan memerintahkan dan menembakkan gas air mata, saat penonton ramai turun dari bangku tribun ke lapangan Stadion Kanjuruhan.

“Langkah sudah kami lakukan dengan pengumpulan data-data di TKP. Yang jelas kami akan serius mengusut tuntas terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan ini dan nanti hasilnya akan kami sampaikan ke masyarakat. Hasilnya akan jadi acuan dalam proses pengamanan selanjutnya,” jelas Sigit.

Seperti diketahui, Polda Jawa Timur (Jatim) langsung menetapkan enam tersangka dalam Tragedi Kanjuruhan, usai mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya di mata hukum. Keenam tersangka adalah sebagai berikut:

1. AHL sebagai Dirut LIB
2. AH sebagai Ketua Panpel
3. SS sebagai security officer
4. Kopsol Wahyu SS sebagai Kabag Ops Polres Malang
5. AKP H sebagai Deputy 3 Danyon Brimob Polda Jatim
6. AKP BSA sebagai Samaptha Polres Malang

Pemeriksaan terhadap para tersangka pun terus dilakukan guna melengkapi berkas penyidikan. Polri juga melakukan rekonstruksi kasus di lapangan sepakbola Mapolda Jatim, Rabu (19/10). Rekonstruksi dihadiri Deputy Kamtibmas Polhukam Irjen Armed Wijaya, Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono, beberapa pejabat Kejaksaan Tinggi Surabaya, pejabat Inafis, dan Labfor Polri.

Ada 54 saksi dan pemeran pengganti, serta tiga tersangka yang menghadiri rekonstruksi ini. Adegan yang diperkarakan dalam reka ulang sebanyak 30 adegan. Dalam pengusutan kasus Tragedi Kanjuruhan, Polri telah



memeriksa 93 saksi dalam kurun waktu tiga pekan.

Termasuk di antaranya 11 ahli, yang terdiri dari satu pakar pidana, 8 dokter dan dua ahli laboratorium forensik.

“Ada (potensi tersangka baru),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai keterangan soal perkembangan kasus tragedi Kanjuruhan, Sabtu 29 Oktober 2020.

Ke enam tersangka dalam Tragedi Kanjuruhan sendiri kini resmi berstatus tahanan polisi. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan lanjutan terhadap keenam tersangka pada Senin, 24

Oktober 2022. Berkas perkara keenam tersangka juga telah diserahkan kepada kejaksaan untuk diperiksa sebelum dibawa ke meja hijau.

Merangkul Hati yang Hancur

Untuk memulihkan kondisi psikis dan fisik, Jenderal Sigit berkunjung ke rumah sakit dan rumah para korban yang selamat dan keluarga korban meninggal dunia. Jenderal Sigit juga berdialog dengan para dokter soal kondisi para korban.

Minggu, 2 Oktober 2022, Jenderal Sigit menjenguk korban luka-luka tragedi Kanjuruhan yang dirawat di

RSUD Kanjuruhan. Kepada Jenderal Sigit, dokter yang menangani para pasien memaparkan beberapa pasien yang mengalami gejala ringan sudah boleh pulang.

“Dan 93 dari yang kita tangani sisa 11 orang. Kebanyakan ringan dan sedang. Ringannya kami pulangkan. Dari 93 itu sisa 11. 8 orang dirawat di IGD, 2 di ICU dan satu orang di ruang inap,” ujar dokter.

Sigit juga sempat menyapa dan berbincang dengan keluarga pasien yang dirawat. Dia meminta keluarga sabar dan berjanji para korban akan

dirawat hingga sembuh. “Yang sabar ya bu. Yang penting sembuh dulu,” ujarnya.

Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menpora Zainuddin Amali dan Ketua PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule, Sigit meninjau lokasi tragedi Kanjuruhan malam harinya. Dalam kunjungannya, Sigit berbincang dengan keluarga korban dan melakukan doa bersama.

“Innalillahi wa Innaillahi rajiun, Innalillahi wa Innaillahi rajiun, Innalillahi wa Innaillahi rajiun. Tentunya pertama, mewakili Pemerintah, Presiden dan

institusi Polri, kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam terhadap meninggalnya saudara-saudara kita, teman-teman sahabat suporter dari Arema karena insiden yang terjadi tadi malam saat selesai rangkaian kegiatan pertandingan antara Persebaya dan Arema,” ujarnya.

Para pejabat Polres hingga Bhabinkamtibmas jajaran Polda Jawa Timur pun melakukan takziah ke rumah korban meninggal pada Tragedi Kanjuruhan. Para personel kepolisian datang untuk mendengarkan keluh

kesah keluarga korban.

“Duka Aremania, menjadi duka Polri, negara bahkan dunia. Air mata keluarga, menjadi air mata Polri. Jadi pascakejadian, setelah korban teridentifikasi seluruhnya dan kami mendapatkan data alamat para korban, polisi di jajaran secara terus-menerus bertakziah, setiap hari silih berganti anggota di jajaran Polda Jawa Timur mengunjungi keluarga-keluarga korban,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis 6 Oktober 2022.



“Alhamdulillah, keluarga korban menerima kedatangan anggota-anggota kami yang di Jawa Timur ini. Harapan para keluarga yang disampaikan kepada anggota-anggota kami hampir semuanya sama, agar kejadian ini diusut tuntas,”

Irjen Dedi mengungkapkan baik korban selamat, keluarganya, serta keluarga korban meninggal dunia dalam Tragedi Kanjuruhan umumnya menerima kedatangan tim kepolisian dalam rangka takziah dan silaturahmi. Irjen Dedi juga menyebutkan keluarga korban meminta keadilan.

“Alhamdulillah, keluarga korban menerima kedatangan anggota-anggota kami yang di Jawa Timur ini. Harapan para keluarga yang disampaikan kepada anggota-anggota kami hampir semuanya sama, agar kejadian ini diusut tuntas,” lanjut dia.

“Dan kepada keluarga pun sudah disampaikan, komitmen Bapak Kapolri, dan sesuai arahan Bapak Presiden, tim dari Propam, Itwasum, Bareskrim maupun Polda Jawa Timur juga bekerja hingga tuntas, secara marathon untuk mengungkap tersangka demi memenuhi rasa keadilan.”

Dedi juga menyebut Polri akan mendampingi proses pemulihan trauma bagi korban selamat dan keluarga korban meninggal dunia. Dedi juga memastikan pihaknya akan membantu keluarga korban secara maksimal. [*]

MEMBURU BOS JUDI Hingga ke Jiran



Medio Agustus 2022, Polda Sumatera Utara mengumumkan pihaknya memblokir 107 nomor rekening bank terkait praktik judi online beromzet miliaran rupiah di perumahan elite Cemara Asri, Deli Serdang.

Data teranyar jumlah nomor rekening bank yang diblokir terkait dengan judi online ini sebanyak 133. Kala itu, Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra mengatakan pihaknya memburu Apin BK, bos judi online tersebut. Selain di perumahan Cemara Asri, Apin BK juga memiliki lokasi untuk mengoperasikan

bisnis judi onlinenya, yakni di Belawan.

Berulang kali mangkir pemeriksaan penyidik Polda Sumut, Apin BK pun ditetapkan sebagai DPO. Penyidik mendapatkan informasi Apin BK kabur ke Singapura pada 9 Agustus 2022.

Namun bak peribahasa 'sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua', Apin BK akhirnya ditangkap.

"Alhamdulillah dengan kerja sama dengan teman-teman dari Kepolisian Diraja Malaysia, salah satu buron atas nama Apin BK yang sempat bersembunyi

di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia, hari ini atas kerja sama dan skema police to police, buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 14 Oktober 2022, sore.

Malam harinya, Kapolri turun gunung memimpin proses penjemputan bos judi kelas kakap yang sempat buron itu di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Jenderal Sigit tiba di bandara pukul 21.41 WIB, sementara pesawat yang membawa Apin BK mendarat pukul 22.33 WIB.



Saat memberi keterangan kepada wartawan, Jenderal Sigit memastikan tertangkapnya Apin BK bukan merupakan akhir dari penyidikan kasus judi online. Sang Jenderal memastikan Bareskrim Polri akan terus menelusuri jaringan judi online Apin BK.

Setibanya di Tanah Air, Apin BK yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye digiring ke Rutan Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), untuk diperiksa. Setelahnya, pria berkacamata itu akan diserahkan ke Polda Sumut.

"Sebagaimana komitmen kami beberapa waktu lalu bahwa kita akan melakukan tindakan tegas terhadap judi online," ujar Jenderal Sigit.

Dalam perkembangan kasus, Polda Sumut kembali mengumumkan total aset yang disita dari Apin BK senilai Rp 145,79 miliar. Aset yang disita berupa ruko dan rumah mewah. Nominal tersebut adalah hitungan dari 22 aset yang telah disita penyidik selama empat kali kegiatan penyitaan. Selain itu, penyidik juga bakal menyita empat aset lainnya yang berada di Kota Medan dan Deli Serdang.

"Sebagaimana komitmen kami beberapa waktu lalu bahwa kita akan melakukan tindakan tegas terhadap judi online,"



3 Bandar Ditangkap di Kamboja

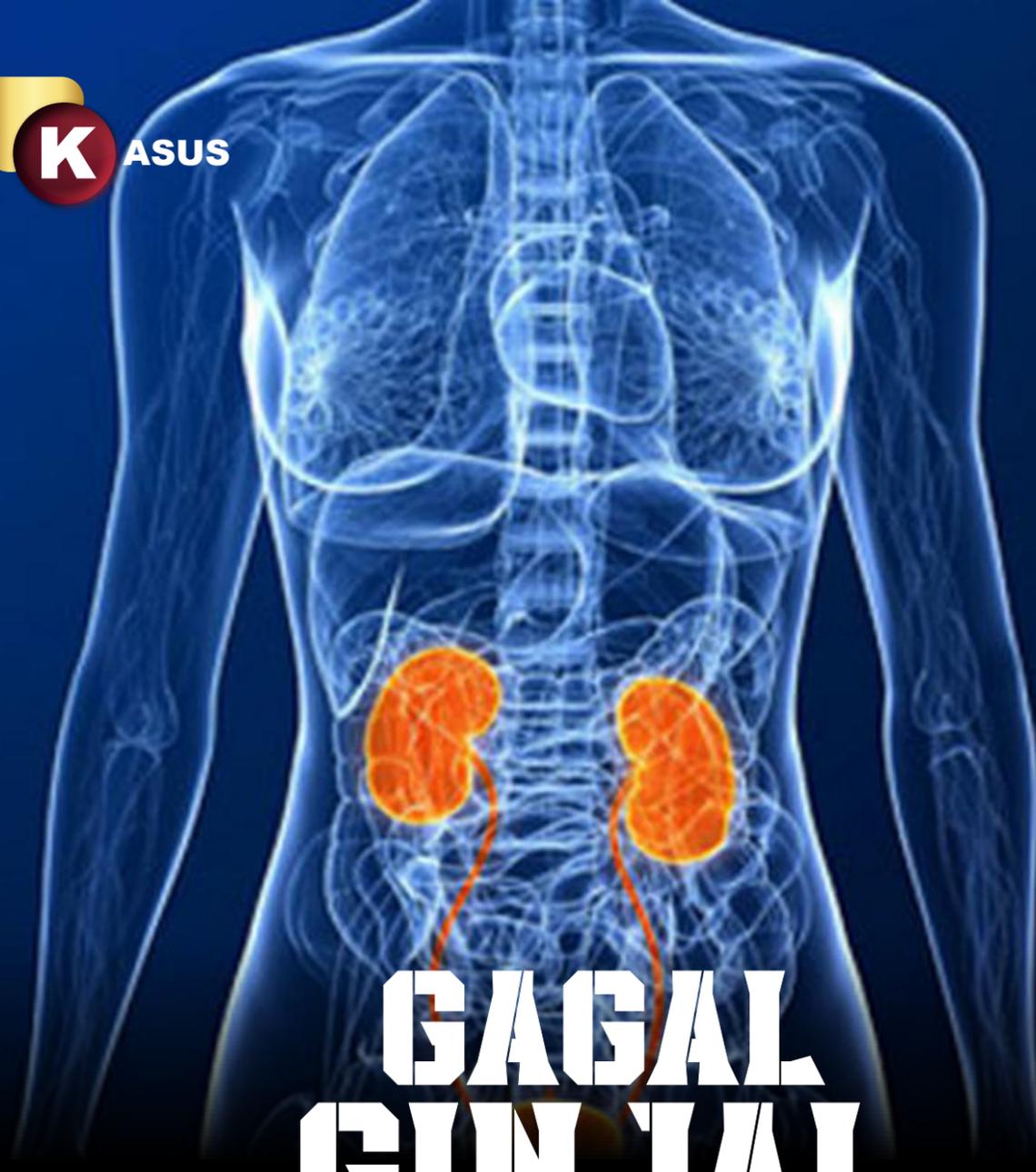
Selain Apin BK, Polri juga menangkap tiga bandar judi online bernama Tjokro Soetrisno, Elvan Adrian Setiawan, dan Ivan Tantowi di Kamboja. Ketiganya dipulangkan ke Indonesia pada Sabtu 15 Oktober.

Penangkapan trio bandar judi online ini berkat koordinasi antara Cambodia National Police, KBRI, Imigrasi dan Polri. Terendusnya bisnis judi online ketiga tersangka bermula dari penangkapan tiga tersangka M, RS, dan MR pada 12 Agustus 2022. Sama seperti Apin BK saat ditangkap, ketiga bandar judi online ini juga mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tangan mereka diikat kabel ties.

"Tentunya ini menjadi komitmen kita untuk betul-betul melakukan tindakan terhadap judi online sesuai instruksi dan perintah arahan Presiden," ujar Jenderal Sigit.

Berbeda dengan Apin BK, ketiga tersangka yang dipulangkan dari Kamboja mengoperasikan bisnisnya di Jakarta. Oleh sebab itu Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Polri menegaskan ketiga tersangka tak terkait Apin BK. [*]





GAGAL GINJAL MISTERIUS

ANCAM GENERASI PENERUS



Penyebab pasti penyakit gagal ginjal akut yang menyerang ratusan anak-anak masih misterius. Meski demikian, negara tak berdiam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta jajaran kabinet berupaya menanggulangi fenomena ini.

Pada Senin, 24 Oktober 2022, Presiden memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkominfo Johnny G Plate, Seskab Pramono Anung, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Bogor, Jawa Barat.

“Utamakan keselamatan masyarakat, jangan menganggap ini masalah kecil. Ini adalah masalah besar,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat.

Presiden Jokowi juga memerintahkan agar pelayanan kesehatan terkait gagal ginjal akut diberikan secara gratis. Dia menyebut penanganan harus diberikan dengan baik.

“Siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini, siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani gagal ginjal ini, dan saya minta diberikan pengobatan gratis pada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali,” jelas dia.

Berangkat dari rapat tersebut, Jenderal Sigit kembali ke Mabes Polri dengan sebuah perintah, yakni usut tuntas penyebab gagal ginjal akut pada anak, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Polri kemudian bergerak dengan membentuk tim untuk mengusut adanya unsur pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang dialami anak-anak.

Tim itu dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Anggota tim ini terdiri dari Direktur Tindak Pidana Umum, Direktur Tindak Pidana Narkoba hingga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipeksus).

Tim ini akan bekerja sama dengan instansi lain untuk menyelidiki kasus tersebut, dua di antaranya Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Polri juga mengeluarkan surat telegram rahasia (STR) dengan memerintahkan Polda jajaran untuk mendata pasien-pasien gagal ginjal akut di wilayahnya masing-masing. Setiap Polda diperintahkan untuk mengambil sampel darah hingga urine dari para pasien tersebut. Hal ini termuat di surat telegram Nomor: ST/2349/X/RES.5.3./2022 tanggal 26 Oktober 2022. STR ini ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Surat Telegram:

1. Melakukan pendataan kasus gagal ginjal akut yang ada di wilayahnya
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama kepada dinas kesehatan, BPOM dan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah berikutnya.
3. Melakukan pengambilan sampel darah, urine dan obat beserta kemasannya dari pasien gagal ginjal akut, untuk darah dan urine kemudian dimasukkan ke dalam cooling box untuk menghindari kerusakan sample.
4. Seluruh sample tersebut agar dilakukan penyegelan untuk keamanan sample dalam proses pengirimannya.
5. Pelaksanaan pengecekan laboratorium sample darah dan urine dilakukan oleh Labfor Polri, sedangkan untuk obat dilakukan oleh BPOM.
6. Seluruh kegiatan pengambilan sample dan pengecekan laboratorium agar dilengkapi dengan administrasi yang lengkap.

"Untuk saat ini, sifatnya penyelidikan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penyidik, kemudian menganalisa. Dan tentunya jika sudah cukup, maka akan dinaikkan dari lidik ke sidik," kata Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kamis 27 Oktober 2022.



Pada kesempatan terpisah, Menkes Budi Gunadi Sadikin buka suara soal permintaan tanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak. Dia mengatakan menyerahkan hal itu kepada aparat penegak hukum.

"Kalau (terbukti ada kelalaian) kita lihat ini sih, kita serahkan saja kepada teman-teman di bidang hukum," kata Budi, Sabtu 29 Oktober 2022.

Tim khusus kasus Gagal Ginjal Akut lalu melakukan serangkaian pemeriksaan secara cermat, mulai dari memeriksa dua perusahaan farmasi yang disebut BPOM terindikasi memproduksi obat dengan kandungan zat berbahaya atau bahan baku tercemar hingga mengumpulkan sampel-sampel

obat, cairan tubuh pasien gagal ginjal dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan stakeholders terkait.

"Kita dalam juga perusahaan lain. Masih ada (perusahaan lain di luar yang dilaporkan BPOM), nanti kita informasikan. Berikan kesempatan kami untuk mengumpulkan semua sampel dari mayoritas pasien," kata Brigjen Pipit Rismanto pada Jumat 28 Oktober 2022.

Brigjen Pipit mengatakan, meskipun adanya dugaan kandungan zat berbahaya dalam obat yang beredar, hingga kini belum disimpulkan penyebab pasti penyakit gagal ginjal akut tersebut.

"Kita sedang pendalaman kita sedang mengumpulkan semua sampel.

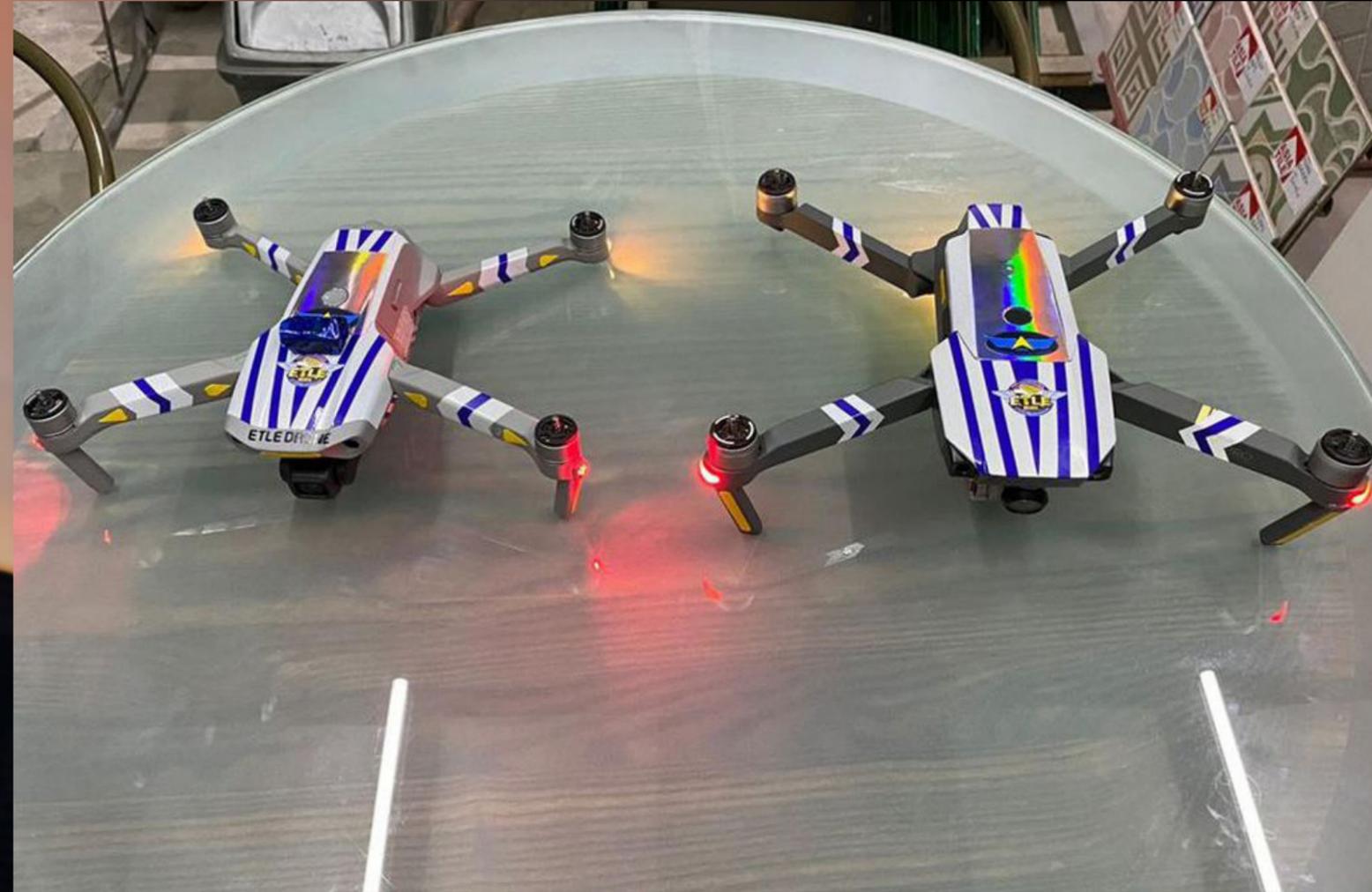
Sekarang belum ada yang memastikan bahwa penyebab gagal ginjal itu apakah obat tersebut atau apa. Makanya kita semua harus sampel semua produk obat yang dikonsumsi," jelasnya.

Brigjen Pipit menuturkan saat ini pihaknya masih fokus mengumpulkan sampel dan meminta klarifikasi dari para perusahaan yang terlibat.

"Kita sedang menelusuri bahan baku yang digunakan. Nanti biar sejalan semuanya. Apakah dari produksinya apakah bahan bakunya atau melebihi ambang batas, itu semua harus pakai scientific, nggak bisa juga mempercepat kesimpulan," pungkas dia. [*]

ETLE DRONE,

Penegakkan Hukum dari Udara



Rencana Polri meninggalkan cara-cara konvensional dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas dan akan mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Selain lebih efektif, pendekatan ini juga meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Saat ini ETLE sudah diberlakukan hampir seluruh Polda di wilayah Indonesia.

Pengembangan tilang elektronik penting dilakukan menggunakan cara-cara yang lebih dinamis untuk mengakselerasi pengembangan sistem ETLE. Paling baru, sistem ini berkembang menggunakan drone camera dan menggunakan Hp Android. Polda Jawa Tengah saat ini mulai melakukan uji coba tilang menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa

Tengah, Kombes. Pol. Agus Suryo Nugroho menyampaikan, uji coba dalam rangka persiapan riset untuk diterapkan secara nasional.

"Lagi riset dan uji coba di Jawa Tengah yang pertama," jelas Dirlantas Polda Jateng dalam keterangannya, Senin 10 Oktober 2022.

ETLE drone merupakan pengembangan dan pembaharuan dari ETLE mobile device, yaitu perangkat

elektronik yang digunakan secara portabel dan mobile.

Sebelumnya kamera ETLE juga terpasang di mobil patroli kepolisian. Kamera ETLE mobile on board itu dapat melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas di titik awan yang tidak terjangkau ETLE statis.

Selain itu juga sudah dioperasikan juga ETLE Mobile Handheld. Petugas kepolisian menggunakan smart gadget yang berfungsi sebagai alat capture pelanggaran lalin dan langsung

terintegrasi dengan data ETLE nasional.

Penggunaan drone sebagai salah satu upaya penyempurnaan dari sistem ETLE, yang sejauh ini hanya menggunakan CCTV dan mobile melalui ponsel yang dipegang petugas polisi di lapangan. "Ini sebagai upaya penyempurnaan penegakan hukum digital," ungkap Dir Lantas Polda Jateng.

Meski belum ditentukan spesifikasinya, drone nantinya akan dilengkapi lampu strobo yang dapat dinyalakan menyerupai kendaraan

patroli polisi.

Dir Lantas Polda Jateng menggandeng Asosiasi Pilot Drone Indonesia sebelumnya telah melatih para petugas kepolisian agar mampu menerbangkan drone untuk kebutuhan ETLE.

Secara garis besar cara kerja drone ETLE ini tidak akan berbeda. Kamera akan memantau lalu lintas dan memberikan tangkapan layar jika ada pengguna kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas.



Dari sana kepolisian akan mempunyai bukti pelanggaran saat melakukan tilang kepada pengguna kendaraan di jalan raya.

Lalu, apa saja pelanggaran yang bisa ditindak polisi menggunakan ETLE drone?

"Nggak pakai helm, melawan arus, TNKB mati atau TNKB palsu, nggak pakai sabuk pengaman, mengemudi sambil menggunakan handphone," jelas Agus.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) Akbar Marwan mengatakan pada prinsipnya, ETLE drone sama seperti ETLE yang ditemukan di jalan saat ini.

Kamera ETLE akan melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas. Kemudian, gambar pelanggaran yang diambil akan dikirimkan kepada back office polisi wilayah tersebut untuk kemudian diproses dan diterbitkan surat tilang.

"Hanya saja, yang membedakan adalah ETLE-nya melalui atau via drone. Adapun pengoperasian dan pengoptimalisasian drone tersebut dengan aplikasi ETLE," ujar Akbar [*]





POS MOBILE KANDANI, Cara Polres Lamongan Layani Warga

Memanfaatkan momen Hari Lalu Lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan memanfaatkan momen Hari Lalu Lintas dengan menambah inovasi multi guna berupa Pos Mobile Kandani (Komunikasi Anda bersama Polisi).

Pos unit mobil berupa kendaraan double cabin, yang dilengkapi peralatan canggih untuk memonitor arus lalu lintas.

Pos Mobile dilengki dengan

kamera CCTV dan Elektronik Tactical Map Game (e-TMG) yang sudah tersambung ke layanan darurat dengan kode akses 110 (hotline 110) dan nanti juga segera ada layanan yang terhubung langsung ke Kapolres.

Tak hanya bermanfaat untuk mengatasi masalah lalu lintas, Pos Mobile juga bisa dipakai pada acara-acara besar yang membutuhkan keamanan.

Kapolres Lamongan, AKBP Yakhob Silvana Delareskha menyebutkan

peluncuran pos mobile tersebut dilaksanakan bersama dengan agenda syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67.

Yakhob menyebut inovasi tersebut merupakan salah satu jawaban atas tantangan tugas anggota kepolisian yang semakin meningkat.

"Kita melaunching pos mobile yang merupakan wujud kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Selain sebagai langkah disiplin, juga



NOVASI

untuk meningkatkan profesionalisme dalam bertugas," kata Yakhob, Senin 26 September 2022.

Ditegaskan, kehadiran pos mobile Satlantas Polres Lamongan ini sebagai jawaban atas pelayanan untuk masyarakat.

Diharapkan keberadaan Pos Mobile ini mampu memberi manfaat di tengah masyarakat mengurai kemacetan dan meminimalisir angka kecelakaan, seperti di tempat-tempat padat arus lalu lintas.

Keberadaan Pos Mobile tersebut mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan serta untuk mengurai kepadatan sehingga terwujud keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcarlantas).

"Sedangkan keunggulan kendaraan layanan publik ini dapat bergerak dinamis dari satu tempat ke tempat lainnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan akan perlunya kehadiran Polri ditengah masyarakat khususnya

yang membutuhkan bantuan," kata Yakhob.

Harapannya inovasi tersebut bisa memberi manfaat dalam mengurai kemacetan dan meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di Lamongan.

Bahkan Pos Mobile ini bisa dipakai untuk pos pengamanan pada acara-acara yang digelar oleh masyarakat.

"Tak hanya untuk kepentingan Lalu lintas. Kalau ada acara yang melibatkan massa banyak, Pos Mobil bisa hadir di situ," kata Yakhob.



Ia juga berharap mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan serta untuk mengurai kemacetan, termasuk meningkatkan rasa aman sehingga terwujud keamanan keselamatan ketertiban, termasuk kelancaran berlalu lintas.

Kasatlantas Polres Lamongan AKP Aristianto Budi Sutrisno menambahkan, kehadiran pos mobile yang dilengkapi CCTV dan E-TMC diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai titik-

titik kemacetan, yang setiap saat bisa muncul di wilayah Lamongan.

"Sehingga anggota dapat cepat mengetahui, titik mana saja yang perlu respon cepat untuk dilakukan penanganan atau tindak lanjut, apalagi anggota kami juga terbatas," kata Aristianto.

Pos Mobile ini digagas juga oleh Satlantas Polres Lamongan terinspirasi dari antisipasi mengurai kemacetan yang terjadi waktu itu Jembatan

Ngaglik 1 jalan Jaksa Agung Suprpto Lamongan mengalami anjlok.

"Ini nantinya, Pos Mobile mampu ke tempat-tempat dimana ada kegiatan masyarakat yang disinyalir menimbulkan kerawanan. [*]



Berkubang Lumpur

Bhabinkamtibmas Daerah Terpencil

Sebagai salah satu daerah terpencil dan terisolir di Sumatera Barat, Kecamatan Tigo di Solok memang jauh dari manapun.

Selain jarak dari pusat pemerintah Kabupaten Solok yang mencapai 80 kilometer, akses menuju kawasan itu terbilang sulit karena mayoritas masih 'beraspal' tanah.

Masyarakat yang hendak ke kantor bupati atau ke Kota Solok setidaknya harus merogoh kocek hingga ratusan ribu hanya untuk ongkos ojek motor.

Ada lima nagari atau desa di Tigo Lurah yakni Rangkang Luluh, Batu Bajanjang, Simanau, Tanjung Balik

Sumiso dan Garabak Data.

Di antara kelimanya, paling parah adalah akses menuju Nagari Garabak Data dan Tanjung Balik Sumiso. Selain itu dua desa itu juga masih blank spot alias tak bersinyal.

Sulitnya keadaan geografis tak lantas menjadi halangan untuk melayani warga. Setidaknya itulah yang dibuktikan para Bhabinkamtibmas di kecamatan itu.

"Setiap nagari punya satu Bhabinkamtibmas, saya di bertugas di Sumiso," kata Brigpol Satri Mairial, Bhabinkamtibmas Nagari Tanjung Balik Sumiso, Minggu 16 Oktober 2022.

Nagari itu memiliki empat jorong yakni Tanjung Barisi, Sungai Dareh, Tanjung Balik dan Tigo Jangko dengan jarak tempuh masing-masing jorong rata-rata 1 hingga 2 jam perjalanan.

Waktu tempuh menjadi molor lantaran akses jalan di nagari tersebut sangat-sangat buruk. Bahkan, ada pemukiman warga yang sampai hari ini belum bisa ditempuh kendaraan bermotor.

Binatang Buas

Mengabdikan hampir selama 10 tahun di daerah terpencil berbatasan hutan, Satri kenyang dengan pahit getirnya menjadi polisi di tengah masyarakat yang



mayoritas berprofesi sebagai petani.

"Alhamdulillah sampai saat ini saya berhubungan baik dengan masyarakat. Pola pendekatannya biasa saja, yang penting mereka nyaman dan tidak takut dengan polisi," kata Satri bercerita.

Dalam kondisi hujan dari kantornya di Polsek Payung Sekaki ke Nagari Tanjung Balik Sumiso, Satri menghabiskan waktu empat jam lebih. Waktu tempuh terpankas menjadi tiga jam jika cuaca cerah.

Perjalanan ke wilayah tugasnya itu dilakukan Satri sekali dalam seminggu dan dalam sebulan ia menginap selama dua hari di nagari.

"Jalannya sangat miris, lebih-lebih saat hujan. Ini keluhan masyarakat di pedalaman Sumiso tiap tahun. Kami sebagai Bhabin tak bisa berbuat apa-apa soal itu," kata Satri.

Bagi Satri selama berulang ke nagari binaan ia terbiasa berkubang lumpur pergi dan pulang kerja. Lebih-lebih saat Pemilu atau ketika mengencarkan vaksinasi Covid-19.

Satri mati-matian mengantar logistik menjangkau masyarakat yang permukimannya melewati jalan tanah, sungai tanpa jembatan dan pendakian terjal.

Berpapasan dengan binatang buas sudah tak membuatnya terkejut. Dalam perjalanannya Satri pernah diadang ular sebesar paha orang dewasa. "Sudah biasa diadang ular. Mau siang, mau malam, sama saja. Tapi saya berharap jangan sampai lihat Harimau," kata dia.

Satri juga punya pengalaman berjalan kaki di tengah hutan lindung hingga 10 jam lamanya. Itu terjadi saat masa pengenalannya menjadi Bhabinkamtibmas di nagari Tanjung Balik Sumiso. Ia menyusuri jalan setapak dari Jorong Sungai Dareh ke Jorong Tigo Jangko yang biasanya dilewati masyarakat selama 8 jam berjalan kaki.

"Saya sampai 10 jam karena sering berhenti. Itu di tengah hutan lindung. Tidak ada akses jalan kendaraan bermotor, tapi kalau dari Kabupaten Sijunjung ada," kata dia.

Minim Konflik

Satri menambahkan warga Nagari Tanjung Balik Sumiso jarang sekali berkonflik. Jika pun terjadi, mayoritas diselesaikan secara musyawarah dengan cara mengumpulkan Niniak Mamak atau tokoh adat masing-masing kelompok yang bertikai.



"Tokoh-tokoh adat di nagari ini sangat terbuka dan bersahabat. Jadi jika terjadi masalah, kami tinggal berkomunikasi dengan beliau. Makanya jarang pertikaian dan konflik sampai ke meja hijau," kata dia.

Banyak faktor dan alasan kenapa mayoritas pertikaian masyarakat di Tigo Lurah dibicarakan secara musyawarah. Paling utama tentu saja karena mempertimbangkan biaya kedua belah pihak yang berkonflik. Jarak kantor Polsek Payung Sekaki cukup jauh, apalagi jika harus sampai ke Polres Solok dan berlanjut ke persidangan.

Sinergitas Bhabinkamtibmas di Tigo Lurah dengan pemerintah nagari dan kecamatan tak perlu diragukan lagi. Mereka berada di garda ikut 'berdarah-darah' dalam segala program pemerintah. Lebih-lebih saat memacu angka vaksinasi Covid-19 tahun lalu. Mereka sampai berkubang lumpur malam hari tak tidur hingga pulang dini hari.

Juga dengan Pemilu, Pilkada hingga pemilihan wali nagari. Para Bhabinkamtibmas mengawal suara-suara masyarakat di pelosok Kabupaten Solok itu. "Semuanya sesuai tugas kami.

"Kehadiran Bhabin di Tigo Lurah sangat membantu. Apalagi saat upaya menggenjot vaksinasi kemarin. Mereka juga dekat dengan masyarakat,"

Mengayomi masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah," kata Satri.

Kerja Keras

Saat vaksinasi Covid-19, para Bhabinkamtibmas sering tidur di nagari. Sebab, vaksinasi di Tigo Lurah kerap berlangsung malam hari, terutama di Nagari Sumiso dan Garabak Data karena petugas tak ingin mengganggu mata pencaharian masyarakat.

"Warga Tigo Lurah rata-rata pagi sampai sore itu di ladang. Makanya vaksinasi sering dilakukan malam hari, tapi itu di nagari Sumiso dan Garabak Data yang sering," katanya.

Relatif sulit membujuk masyarakat untuk menjalani vaksinasi. Para Bhabinkamtibmas harus mengunjungi rumah-rumah warga dan meyakinkan mereka tentang pentingnya vaksin Covid-19.

Penyuntikkan vaksin pun tidak tersentral di Puskesmas. Ada yang di rumah warga, sekolah dan sebagainya. "Ada yang kami jemput pakai sepeda motor dari rumahnya untuk vaksin. Sering juga vaksin malam hari itu selesainya dini hari," katanya.

Begitu juga saat terjadinya bencana alam, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Para Bhabinkamtibmas bersama pihak nagari, kecamatan dan Babinsa, bahu-bahu membantu masyarakat. "Sangat terasa kehadiran Bhabinkamtibmas, terutama saat terjadinya bencana," kata Camat Tigo Lurah, Tedi Aurora.

Tedi mengatakan, keberadaan Bhabinkamtibmas di Tigo Lurah sangat membantu dan meringankan pekerjaan pemerintah. Berbagai sosialisasi program pemerintah terutama di nagari, terlaksana berkat Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga. Dia berharap, sinergitas ini terus terjaga.

"Kehadiran Bhabin di Tigo Lurah sangat membantu. Apalagi saat upaya menggenjot vaksinasi kemarin. Mereka juga dekat dengan masyarakat," kata dia. [*]

Bangkitkan Ekonomi Warga dengan Sayur



Wajah sumringah itu jelas terpancar dari Yosias Buinei, warga Kelurahan Anoutorei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Terik matahari tak menghalangi kebahagiaannya memanen hasil kebun di belakang dan samping rumahnya.

Mengangkat berbagai sayur di tangan dengan kegembiraannya yang meluap Yosias memanggil seseorang. "Anak, sayur bagus sekali, sini bantu bapa panen, banyak sekali, Puji Tuhan," kata Yosias.

Aplena Smas seorang polisi wanita yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Polres Kepulauan

Yapen. Ia sengaja diundang Yosias untuk membantu memanen hasil kebunnya.

Seperti yang dilakukan Bripka Aplena Smas di Kelurahan Anoutorei. Kisah suksesnya membina warga jelas membuatnya bahagia. Terlebih warga binaannya kini lebih berkembang.

"Kami hadir untuk masyarakat, terlebih melalui binmas noken melalui program-programnya akan membantu masyarakat, dan membantu masyarakat panen sayur ini salah satu tugas yang di lakukan," kata Aplena.

Di sela-sela membantu petani tersebut yang juga memberikan

bantuan berupa pupuk urea, dan bibit sayur lainnya, Bripka Aplena Smas juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar selalu bersama-sama dengan aparat keamanan menjaga situasi yang aman kondusif.

Pendampingan berdampak positif bagi perekonomian warga karena dengan aparat keamanan menjaga sayur kol, sawi, timun hingga cabai bisa dijual untuk menghidupi keluarga.

Yosias adalah salah satu warga binaan kemasyarakatan Bhabinkamtibmas Polres Kepulauan Yapen bidang pertanian untuk menjaga ketahanan pangan lokal.

Sejak Covid-19 melanda negeri, Binmas Polres Yapen turut terlibat dalam pemulihan masyarakat, baik bidang kesehatan maupun ekonomi rakyat.

"Kami memberikan bibit tanaman dengan tujuan membantu meringankan beban warga binaan kami di perkampungan, sehingga masyarakat merasa terbiasa dengan kehadiran Polri," kata Aplena Smas.

Ia bercerita pendampingan kepada warga mulai dilakukan sejak

27 Desember 2021. Saat itu ia hanya memberikan bibit sayur sawi dan bayam.

Tentu saja kehadiran Aplena disambut hangat hingga warga binaannya memperluas kebun di sekitar lingkungan rumah dengan ditanami kol, cabe, tomat hingga ketimun.

"Saya pikir hanya belakang rumah saja yang mau dijadikan kebun, malah sampai keliling rumah. Sempat kaget dengan kemajuan ini, padahal yang kita serahkan bantuan bibit ini tidak banyak," kata Aplena heran.

Kebun milik Yosias kini telah berkembang hingga seluas 200 meter yang terletak di belakang rumahnya. Bahkan, Yosias telah memiliki tempat pembibitan sendiri berkat dorongan dan pendampingan Aplena.

Ini menunjukkan Program Bhabinkamtibmas Polres Kepulauan Yapen berhasil membantu masyarakat di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Gara-gara kebun itu jugalah Yosias bangkit dari kesulitan dan mampu menyekolahkan anaknya.

"Awalnya hanya jualan singkong dan



pinang, tapi karena adanya binaan dari ibu Polwan ini dari Polres Yapen sa bisa berkembang, sa tau harus jual ke mana, dan su mulai jual bibit sayur juga, sama buka kios kecil-kecilan, bisa kas sekolah anak dari hasil kebun," kata dia.

Yosias berharap warga yang ingin menggeluti profesi serupa dengannya bisa mendapat kesempatan untuk dibina oleh Bhabinkamtibmas Polres Kepulauan Yapen.

"Senang sekali, selain jaga keamanan polisi juga bisa bantu tong. Untuk bina torang jang hanya di saya

saja, semoga warga sekitar juga bisa dapat manfaat yang sama," kata Yosias.

Tak hanya membantu bibit, Aplena terjun langsung memantau langsung keberlanjutan warga binaannya tersebut. Mulai dari cara berkebun hingga proses pemasaran sayur yang telah dipanennya.

"Ya pastinya tidak kita serahkan bibit lalu selesai. Kita ingin juga hal ini bisa menjadi mata pencaharian dari bapak Yos," kata Aplena.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Erny Tania berterima

kasih atas peran kepolisian yakni Bhabinkamtibmas yang dengan tekun mengajarkan para petani untuk bercocok tanam yang baik, hingga memperoleh hasil yang berlimpah.

"Program kembali ke kebun dengan menanam pangan lokal diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di tengah ekonomi global saat ini. Pemerintah daerah sangat berterima kasih dengan peran Polri yang sangat nyata di tengah masyarakat Yapen," kata Erny bersemangat. [*]

POLISI INI SUKSES BANGUN 16 RUMAH LAYAK HUNI



Niat membangun rumah layak huni bagi seorang lansia tahun 2017 silam, Aipda Deni Putra, Bhabinkamtibmas Gampong Sarah Sirong, Kabupaten Bireun ini akhirnya sukses membangun 16 rumah bagi warga miskin di berbagai pelosok.

Prihatin dengan kehidupan kakek Usman (70) yang sebatang kara tinggal di gubuk tak layak huni, Deni akhirnya membulatkan tekad membangun rumah yang layak bagi warga Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen itu.

Untuk membangun rumah tersebut, Deni menjual sepeda motor trailnya dengan cara lelang di media sosial. Aksi itu sempat viral dan mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan.

Trail pribadinya itu terjual seharga Rp 30 juta lantas seluruh uangnya digunakan untuk biaya bangun rumah berkontruksi kayu ukuran 3 x 4 meter beserta perlengkapan agar si kakek hidup nyaman menghabiskan masa tuanya. "Alhamdulillah niat saya untuk membangun rumah warga miskin saat

itu terwujud," cerita Deni.

Belakangan, ketulusan Deni Putra membangun rumah layak huni untuk warga miskin dengan menggunakan biaya sendiri di Kabupaten Bireun itu menuai banyak apresiasi. Dukungan dan simpatipun mengalir dan banyak orang berharap bisa ikut bergabung memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Tak menyalahi dukungan itu pada tahun 2019, Deni lantas mendirikan komunitas yang diberi nama Kami Peduli Bireuen (KPB). Komunitas



itu digunakan sebagai wadah saling barbagi kepada warga miskin yang ada di Bireuen.

"Alhamdulillah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini kami sudah membangun 16 unit rumah layak huni untuk warga miskin yang ada di Kabupaten Bireuen, kegiatan sosial ini tentu dapat berjalan sampai sekarang karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk ikut saling barbagi kepada warga yang kesulitan," kata dia.

Dengan manajemen yang baik, Komunitas Kami Peduli Bireun (KPB) saat ini telah memiliki donatur tetap. Mereka datang dari berbagai kalangan

seperti pengusaha, dermawan, rekan kenalannya baik di dalam maupun luar negeri.

Bahkan ada juga siswa sekolah tingkat SD terlibat menggalang donasi untuk disalurkan melalui komunitas KPB kepada keluarga miskin dan kaum shuafa yang membutuhkan bantuan.

"Alhamdulillah karena niat KPB ikhlas ingin membantu, sampai sekarang kita punya donasi tetap, mulai dari siswa SD, SMP, dan SMA di Bireuen yang rela menyisihkan uang jajan untuk disumbangkan kepada warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan kita," kata Deni,

Tak hanya membangun belasan rumah layak untuk keluarga miskin dan kaum dhuafa di seluruh pelosok Bireuen, pada tahun 2020 Komunitas Kami Peduli Bireuen (KPB) juga membangun satu unit sumur bor sebagai sarana sumber air bersih untuk warga Gampong Cot Jrat, Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Pembangunan itu dilaksanakan karena sebelumnya warga kampung tersebut kesulitan mendapatkan sumber air bersih lantaran pemukiman berada di kawasan perbukitan.

"KPB mendapat bantuan dana Rp 30 juta, kemudian dana tersebut kami gunakan untuk membangun sumur



bor kepada warga Gampong Cot Jrat yang sebelumnya mengeluh kesulitan sumber air bersih," kata Deni.

Komunitas KPB juga peduli terhadap lansia dan anak penderita berbagai penyakit langka dengan cara membantu biaya pendampingan saat menjalani perawatan.

Beberapa di antaranya adalah anak penderita bocor jantung, empedu, kusta dan penyakit langka lainnya yang diberikan biaya transport, dan biaya kebutuhan keluarga saat berobat di Rumah Sakit rujukan.

"Anak penderita penyakit langka kami dampingi, mereka kami berikan

biaya untuk transport dan biaya kebutuhan konsumsi keluarga selama mendampingi pasien di rumah sakit. Lansia kami berikan bantuan sembako, korsi roda, dan tongkat," kata dia.

Tak tanggung-tanggung, Komunitas KPB kini juga memiliki satu unit ambulans yang selalu siap mengantarkan pasien rujukan, jenazah yang tidak memiliki biaya. Kita sediakan gratis, kemudian kepada disabilitas juga ada kita berikan becak motor untuk menunjang aktivitasnya."

Tak hanya itu, selama dilanda Covid 19 komunitas Kami Peduli Bireuen juga telah menyalurkan bantuan biaya

pendidikan kepada 10 orang anak yatim dan anak kurang mampu secara bergilir setiap bulannya sebesar Rp 250 ribu.

Setiap bulan ada 10 orang anak yang diberikan beasiswa sehingga anak yatim dan miskin berprestasi di Bireun tidak terkendala menempuh pendidikan demi mewujudkan cita-cita seperti anak lain seusianya.

"Sejak Covid 19 sudah dua tahun ini KPB juga fokus memberikan dukungan kepada anak yatim dan miskin berprestasi," kata Deni. [*]

MENEMBUS HUTAN

Demi Bangun Jalan



Tantangan dan kesulitan tak harus membuat menyerah. Segala keterbatasan justru acap kali menjadi cambuk untuk mencari jalan keluar. Hal itu juga berlaku bagi warga masyarakat di Kampung Yeretuar, Distrik Teluk Umar, Nabire, Papua. Terkepung kondisi geografis yang sulit, Kampung Yeretuar yang hanya bisa diakses melalui laut itu tak lantas membuat masyarakat menyerah. Mereka bertekad membangun jalan dengan menembus hutan untuk mencapai pesisir.

Tak tanggung-tanggung jalan yang harus mereka buat itu mencapai panjang hingga 40 kilometer. Adalah Aiptu Hudyanto Rada sosok yang berada di balik gagasan nekat membuka keterisoliran kampung itu. Bagi Hudyanto mengemban tugas sebagai pengayom masyarakat khususnya di wilayah terpencil seperti Papua memang membutuhkan semangat dan dedikasi tinggi. Tidak hanya dengan melaksanakan rutinitas kedinasan menjaga Kamtibmas tindakan kongkrit merupakan hal yang

patut dilakukan. Pria yang sehari-harinya menjabat sebagai Kepala Pos Polisi Yeretuar, Polres Nabire itu berinisiatif membangun jalan sepanjang 40 km di wilayah tugasnya di Kampung Yeretuar, Distrik Teluk Umar, Nabire. Lebih membanggakan lagi jalan itu dibangun tanpa peserpun menggunakan bantuan dari pemerintah. Biaya pembangunan jalan itu murni uang pribadi dan swadaya masyarakat setempat. "Saya membangun jalan ini bersama



masyarakat selama 4 tahun secara swadaya murni," kata Hudiyanto. Tak lalu, pembangunan jalan itu mulus tanpa kendala. Masalah utamanya adalah dana yang terbatas. "Saya dapat uang sedikit saya beli BBM dan sewa operator ekskavator untuk melanjutkan pembangunan jalan. Alhamdulillah jalannya sudah tembus di kampung Teluk Umar," kata dia. Kampung Yeretuar terletak lebih dari 120km dari Kota Nabire dan walaupun

masih berada di daratan yang sama, kampung ini hanya bisa diraih melalui jalur laut melalui Teluk Umar. Namun dengan penuh antusias Hudiyanto berharap jalan tersebut dapat terus dibangun demi kemajuan masyarakat adat setempat. Ia juga menambahkan selama ini dia memang tidak pernah mempublikasikan kegiatan yang dilakukannya ke media. Hudiyanto berharap jalan tersebut dapat terus terbangun, demi untuk

membuka isolasi yang ada di daerah itu bagi kepentingan khalayak masyarakat adat setempat. Ia menyebut masyarakat jelas sangat antusias dan senang sekali menyambut pembukaan dan pengerjaan jalan itu. "Semoga jalan ini dapat kita kerjakan dan diperpanjang terus, jika anggarannya mencukupi," kata dia. Disinggung soal apakah ada perhatian pemerintah dan hal ikut

membantu mengerjakan jalan tersebut, Hudiyanto menyebut sekali lagi bahwa jalan itu dibangun murni swadaya yaitu oleh dirinya sebagai inisiator bersama masyarakat. "Saya sendiri yang punya inisiatif membuka isolasi yang ada dengan membangun jalan ini, dibantu oleh masyarakat tentunya," kata Hudiyanto. "Saya berharap semoga jalan ini dapat kita kerjakan dan diperpanjang terus, jika anggarannya mencukupi." [*]



SISIHKAN GAJI DEMI BANGUN Rumah Belajar



Dari hasil menyisihkan gajinya, seorang polisi di Cianjur mendirikan rumah belajar di lingkungannya. Rumah belajar itu dikhususkan bagi anak-anak putus sekolah yang umumnya dikarenakan perekonomian orang tua mereka yang sulit.

Adalah Aipda Sopyan Sahuri Bhabinkamtibmas Polsek Cugenang Cianjur, Jawa Barat yang menggagas aksi mulia itu.

Tak lalu semudah membalik telapak

tangan. Karena anak-anak itu memilih untuk bekerja membantu orang tua dibanding mesti kembali belajar.

“Berat ketika memulai karena sebagian besar anak putus sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA yang ada di lingkungan kami ini, menolak untuk meneruskan sekolah karena memilih untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga,” kata Sahuri.

Tak mau menyerah, ia tak bosan-bosannya membujuk anak-anak itu untuk terus belajar. Tak kurang

upaya untuk menyambangi satu demi satu rumah anak-anak yang putus sekolah untuk mendorong mereka agar mau kembali sekolah.

Ia juga mendatangi orang tua mereka agar mengizinkan anaknya untuk meneruskan pendidikan. Dari sanalah kemudian niat makin bulat untuk mendirikan rumah belajar bagi anak-anak itu semua usia anak putus sekolah.

Rumah belajar yang baru memiliki satu ruang kelas itu dibangun di atas

tanah seluas 100 meter persegi yang merupakan tanah milik keluarga Aipda Sopian yang dihibahkan untuk kegiatan pendidikan yang dinamai Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Sedangkan bangunannya didirikan dari uang tabungan yang disisihkan dari gajinya selama menjadi anggota Polri.

"Saya bukan orang berpunya, tapi demi pendidikan saya rela mengeluarkan tabungan untuk membangun rumah belajar ini. Supaya anak-anak bisa tetap belajar dan memiliki kesempatan sukses di masa depan," kata Sahuri.

Anak-anak yang belajar PKBM nantinya juga mendapat ijazah seperti siswa sekolah formal pada umumnya.

Dia mengatakan saat ini ada sekitar 20 anak yang melanjutkan sekolah di rumah belajar yang dibangunnya. Para anak tersebut tidak dipungut biaya sedikitpun.

"Saya sudah sampaikan pada orangtua, jika semuanya gratis tidak perlu bayar. Dari situ mulai ada kesadaran orangtuanya untuk menyekolahkan anaknya lagi. Dengan begitu saja pun bagi saya sudah menjadi

bayaran yang sangat besar, karena anak bisa kembali sekolah," kata dia.

Membagi waktu antara belajar dan membantu perekonomian keluarga, anak-anak itu hanya perlu masuk dua hari dalam setiap minggu. Sisa waktu masih bisa digunakan untuk membantu orang tua.

"Ada yang sambil bekerja, tapi saya minta ketika waktunya belajar mereka harus masuk. Dan ternyata mereka mau menuruti apa yang saya minta. Semangat mereka belajar memang tinggi, hanya ekonomi dan kondisi



"Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cugenang ini, tidak hanya melakukan pembinaan bagi warga namun juga memberikan pendidikan untuk anak putus sekolah. Kami akan membantu apa saja yang dibutuhkan Sahuri dan siswanya,"

keluarga yang memaksa mereka putus sekolah," kata dia.

Sahuri berharap dengan rumah belajar yang didirikannya itu anak-anak bisa menggapai kesuksesan di masa depan. Termasuk mengangkat harkat dan derajat keluarganya dengan ilmu.

Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan, mendukung penuh upaya anggotanya untuk memberikan pendidikan bagi anak putus sekolah di lingkungan tempat tinggalnya.

Bahkan pihaknya memberikan bantuan untuk 20 siswa yang kembali mengenyam pendidikan di rumah belajar milik Sahuri.

"Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cugenang ini, tidak hanya melakukan pembinaan bagi warga namun juga memberikan pendidikan untuk anak putus sekolah. Kami akan membantu apa saja yang dibutuhkan Sahuri dan siswanya," kata Doni. [*]



PERUBAHAN RADIKAL ITU Datang dari Jalanan



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan agar Polantas tak lagi melakukan tilang manual. Sebagai gantinya, polisi akan memaksimalkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Saat ini sistem ETLE sudah diterapkan sepenuhnya di seluruh Polda. Bahkan, beberapa Polda sudah mencabut tilang manual dan memanfaatkan ETLE.

“Dan nanti yang mobile juga kita akan lengkapi dengan kelengkapan seperti body worn, kemudian mobil yang dilengkapi dengan hal-hal seperti itu,” ujar Listyo Sigit dalam keterangannya, Senin 31 Oktober 2022.

Kapolri juga menginginkan peran anggota polisi lalu lintas di lapangan lebih kepada melakukan langkah-langkah yang sifatnya turun ke jalan membantu masyarakat.

Jika ada pelanggaran, diharapkan anggota melakukan edukasi kepada pelanggar lalu lintas, memberikan arahan, dan kemudian setelah itu memberikan kesempatan untuk pelanggar melanjutkan perjalanan.

“Jadi mengurangi hal-hal yang sifatnya menimbulkan stigma negatif. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk memanfaatkan teknologi informasi,” tegas Kapolri.

Ia juga berharap dihapusnya tilang manual ini juga menjadi pembelajaran buat masyarakat agar tetap mematuhi aturan lalu lintas meski tidak ada lagi tilang manual. Apalagi, Kapolri juga mewanti-wanti tingkat kecelakaan lalu

lintas yang menjadi penyebab kematian tertinggi.

“Saya kira kita semuanya sepakat bahwa yang namanya keselamatan di jalan itu harus tetap diperhatikan. Karena angka kecelakaan lalu lintas itu salah satu penyebab kematian tertinggi. Jadi, ini juga harus kita ingatkan. Di satu sisi anggota kita betul-betul bisa tampil menjadi etalase yang baik untuk institusi Polri,” kata Kapolri.



Perubahan mekanisme tilang dari manual menjadi elektronik ini juga membantu memulihkan citra kepolisian. Sebab, stigma terkait pungli banyak ditemukan di jalan.

“Dengan menggunakan ETLE, kita harapkan anggota kita, etalase kita yang paling depan, anggota lalu lintas ini kemudian tampil menjadi sosok yang tegas, yang humanis, yang datang pada saat masyarakat butuh karena macet, di situ ada polisinya,” jelas Kapolri.

Selain sistem tilang yang diubah, Kapolri juga menyebut akan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah

satunya soal pengurusan surat izin mengemudi. “Yang dulu harus datang langsung, saat ini bisa menggunakan SIM online,” kata Kapolri.

Tak hanya soal SIM, Polri juga berencana akan membenahi penggunaan pelat nomor kombinasi huruf RF. Menurut Kapolri langkah tersebut merupakan bagian dari cara Polri untuk memperbaiki citra.

“Termasuk juga apa sih yang kira-kira membuat masyarakat kesal dengan hal-hal yang terkait dengan kepolisian, tentunya kita perbaiki. Ini sedang kita dalami,” kata Kapolri.

“Misalkan, pelat RF, misalkan begitu. Ini kan khususnya di kota besar itu kan khusus diberikan kepada (fungsi tertentu) yang memang ada kaitannya dengan kepolisian, dinas, atau VVIP. Tapi kan faktanya masyarakat mungkin melihat, ‘Oh ternyata bukan polisi’, misalkan. Itu tentunya akan kita perbaiki,” kata Kapolri.[*]

Polri SIAP AMANKAN G-20



Polri siap menggelar berbagai persiapan dalam mengamankan KTT G20 yang bakal digelar di Bali pada 15-16 November 2022. Polri mengerahkan 3.000 personel polisi akan mengamankan seluruh rangkaian presidensi G20.

"Pengamanan ada 3.000 personel," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin 31 Oktober 2022.

Lebih lanjut disampaikan, 3.000 personel itu sudah termasuk personel dari Polda Bali hingga Polda Jawa Timur.

Nantinya, 1.500 personel akan terlibat langsung dalam pengamanan seluruh rangkaian G20. Sedangkan 1.500 personel lainnya disiapkan untuk menghadapi situasi kontingensi.

"1.500 personel itu lah yang nanti akan membackup dari 1.500 personel

yang terlibat langsung di dalam pengamanan ring 1, ring 2, ring 3," kata dia.

Irjen Dedi juga menjelaskan Polri telah menyiapkan rencana kontijensi guna mengantisipasi bencana alam yang dimungkinkan terjadi pada musim hujan tersebut dengan menyiagakan personel serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Dedi menyebutkan ada 1.500



personel yang disiapkan dalam penanganan dan penanggulangan bencana di wilayah Bali. Jumlah personel ini berbeda dengan personel Polri yang disiapkan untuk pengamanan.

Kondisi kontijensi yang diantisipasi bukan saja bencana alam, tetapi juga kejadian-kejadian menonjol lainnya termasuk terorisme. "Ini akan digunakan untuk mitigasi terhadap bencana," kata Dedi.

Secara keseluruhan, Polri melibatkan 8.000 personel dalam pengamanan KTT G20 yang berlangsung

bulan November 2022, meliputi pengamanan keamanan, pengamanan di lokasi acara, pengamanan rutin, pengamanan potensi unjuk rasa, pengamanan di bandara, pengamanan tempat-tempat yang dikunjungi delegasi, hingga pengamanan kawasan penyangga Denpasar.

Sebelumnya, Polri juga telah menggelar rapat terkait manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20

yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang.

Polri telah melakukan berbagai persiapan diantaranya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono telah melakukan peninjauan venue Presidensi G20 di GWK Festival Park dan Posko BKO Korlantas Tragia.

Polri juga menerima kunjungan delegasi home security group home office United Kingdom (UK) atau Badan Keamanan Dalam Negeri (Kemendagri) Inggris di ruang kerja WaKapolda Bali.

Kepala Korps Lalu Lintas



(Kakorlantas) Irjen Pol Firman Shantyabudi sebelumnya mengimbau agar masyarakat sekitar lokasi KTT G20 di Bali tidak memarkirkan kendaraan di pinggir jalan pada saat tanggal-tanggal tertentu.

Firman menjelaskan, beberapa hal yang menonjol yang mungkin dihadapi yaitu ada beberapa ruas jalan yang tidak cukup lebar di Bali.

"Bagaimana masyarakat ikut menyiapkan kegiatan ini dengan para pemilik kendaraan tidak memarkirkan kendaraan yang ada di pinggir jalan," kata Firman, Selasa 27 September 2022.

Menurut Firman, dalam pengamanan G20 pihaknya akan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah guna melancarkan lalu lintas selama kegiatan KTT G20.

Ruas jalan di Bali juga tidak mungkin dilakukan secara dua lajur berlawanan langsung, sehingga berpotensi akan diberlakukan sistem buka-tutup sementara.

Sementara itu, ratusan unit kendaraan listrik yang akan digunakan polisi untuk pengamanan dan pengawalan selama KTT G20 itu mulai tiba di Bali.

Polri menerjunkan 174 unit kendaraan listrik untuk melakukan pengawalan terhadap delegasi tamu negara serta melakukan pengamanan kegiatan presidensi KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022.[*]

R. SOEMARTO, PENGGAGAS LAHIRNYA MOBRIG

Mobrig tak boleh dipergunakan untuk menangani perkara-perkara kecil yang akan diurus oleh polisi biasa. Kesatuan ini juga harus bersikap tegas dan bijaksana dalam menjalankan tugas pokoknya.



Sebagai elemen cadangan, Tokubetsu Keisatsu Tai sejak semula memang dirancang memiliki mobilitas tinggi. Selain persenjataan yang lebih lengkap dibanding polisi biasa, personel Tokubetsu Keisatsu Tai umumnya direkrut dari polisi-polisi yang masih muda.

Didirikan di setiap karesidenan di Jawa dan Madura, kesatuan ini juga bisa digerakkan dengan cepat sesuai kebutuhan balatentara Jepang.

Pendek kata, sebagai bagian dari strategi perang Asia Timur Raya kesatuan ini memang istimewa sesuai dengan namanya yang di-indonesiakan dengan bermacam-macam sebutan seperti Pasukan Polisi Istimewa, Polisi Istimewa atau Barisan Polisi Istimewa, Pasukan Polisi Perjuangan, hingga Polisi Gerak Cepat dan lain-lain.

Ketika Jepang menyerah kepada balatentara Sekutu, mereka melucuti persenjataan PETA sementara Tokubetsu Keisatsu Tai dibiarkan tetap bersenjata karena bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Situasi itulah yang lantas menjadi berkah ketika pada 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Di setiap kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang dan Yogyakarta, Tokubetsu Keisatsu Tai berdiri paling depan memelopori massa dan laskar rakyat mendobrak gudang-gudang senjata Jepang sebagai modal perjuangan. Senjata rampasan itulah yang lantas dibagi-bagikan kepada eks PETA, Heiho hingga laskar rakyat.

Adalah Komisaris Polisi TK.I Soemarto yang ketika itu menjabat Wakil Kepala Kepolisian Negara berinisiatif mengubah nama polisi istimewa menjadi Mobile Brigade saat Markas Besar Kepolisian berada di Purwokerto, Jawa Tengah.

Kesatuan ini juga dirancang menjadi tulang punggung dalam membangun citra kepolisian yang tangguh, cekatan, serta dapat menjadi kekuatan tempur.

Perubahan diperlukan agar kesatuan ini menjadi pasukan yang berdisiplin tinggi, kompak, loyal, penuh dedikasi dan mampu bergerak secara cepat dan dinamis. Kesatuan ini senantiasa harus bergerak dalam ikatan satuan yang agak besar dan jika bergerak di salah satu tempat ia tak boleh tinggal berlama-lama.

R Soemarto berencana kesatuan ini tak boleh dipergunakan dalam perkara-perkara yang kecil karena hal itu akan dilaksanakan oleh polisi biasa. Disamping itu, kesatuan ini juga harus

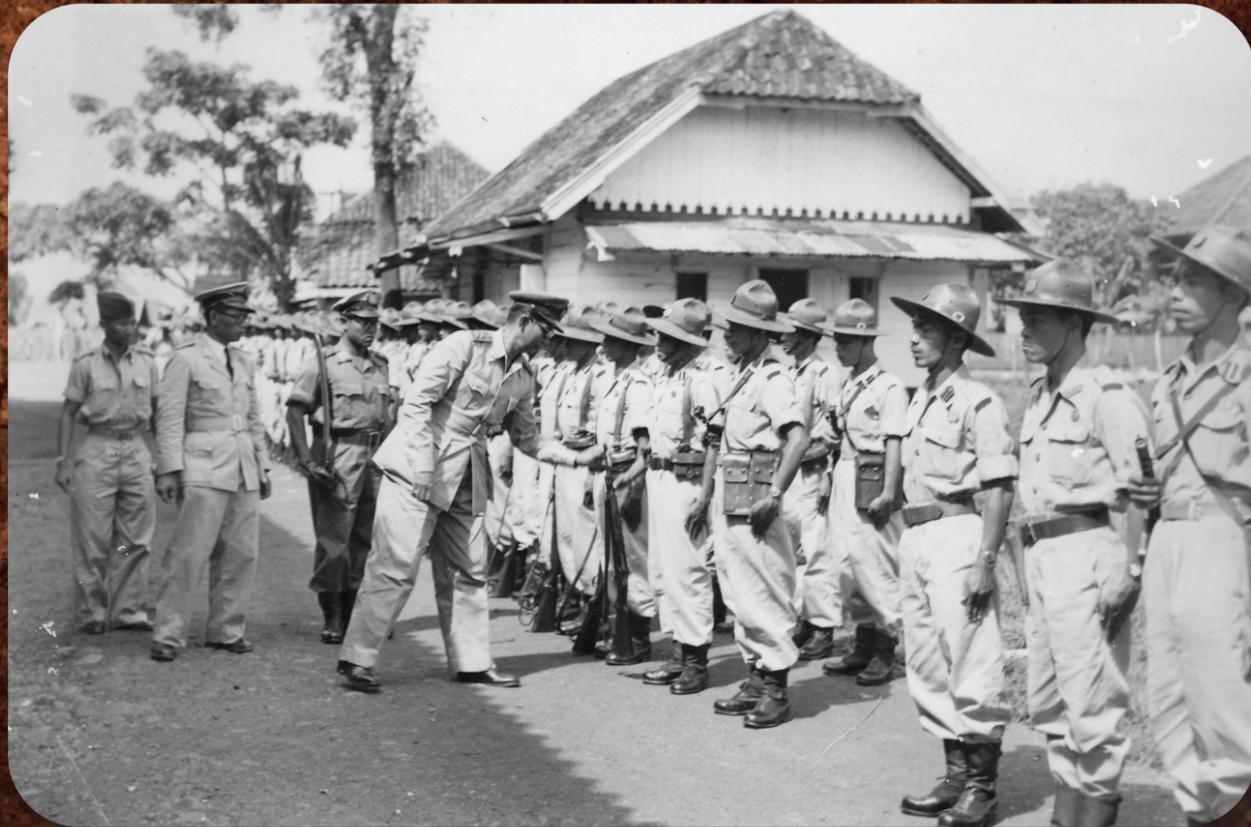
bersikap tegas dan bijaksana dalam menjalankan tugas pokoknya.

Konsolidasi Mobrig

Gayungpun bersambut ketika gagasan itu disodorkan kepada Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto. R. Soemarto segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Muda Kepolisian No. Pol. 12/78/91 tertanggal 14 Nopember 1946 tentang Pasukan Polisi Istimewa dan sebutan lainnya untuk dikonsolidasikan kemudian diberi nama baru Mobile Brigade.

Mobile Brigade dibentuk di setiap karesidenan dengan sebutan Mobile Brigade Karesidenan (MBK) dengan kekuatan personel sekitar 100 orang yang dipimpin seorang inspektur polisi kelas 1 atau kelas 2 dengan sebutan Komandan Mobile Brigade.

Di samping itu, dibentuk pula pasukan Mobile Brigade Besar (MBB) yakni Mobile Brigade Besar Jawa Tengah berpusat di Surakarta, Mobile Brigade Besar di Jawa Timur berpusat di Blitar serta Mobile Brigade Djawatan yang berkedudukan di Purwokerto.



Insp. Polisi Hugeng mempersilahkan Wk. Kepala Polisi Sumarto memberikan wejangan.

Dalam segi administratif dan taktis, Mobile Brigade Karesidenan berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Karesidenan. Sementara itu, Mobile Brigade Besar secara taktis dan administratif langsung berada di bawah Djawatan Kepolisian Negara.

Garis komando Mobile Brigade Besar berada langsung dari pusat yaitu Djawatan Kepolisian Negara. Hal ini berarti bahwa Mobile Brigade Karesidenan secara hierarki tidak berada di bawah Mobile Brigade Besar.

Lahir di 3 Agustus 1901 di Sokaraja Banyumas Jawa Tengah, Raden Soemarto mengawali karirnya sebagai Hoofdrachresecur van Politie di tahun 1927 dan menjadi Commisaris van Politie 1e klass atau Komisaris Polisi Kls I tahun 1943 Pekalongan dan menjadi Komandan Tokubetsu Keisatsu Tai tahun 1945.

Pada masa kemerdekaan, Soemarto diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Juni 1946 mendampingi R.S.

Soekanto Tjokrodiatmodjo. Ketika akhirnya Markas Kepolisian Negara di Purwokerto jatuh, Soemarto diketahui sempat menyamar dengan nama Kawer Damanuri.

Tentu saja penyamaran itu bertujuan agar tidak mudah ditemukan tentara Belanda. Selama kurang lebih tiga bulan Soemarto bersembunyi di Candiwulan, Kutasari, Purbalingga dan tidur di lantai tanah dan hanya beralaskan jerami. [*]

Hapus Tilang Manual, Polda Metro Andalkan ELTE Statis dan Mobile

Instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk tidak menggelar operasi penindakan tilang secara manual ditindak lanjuti Polda Metro Jaya dengan memaksimalkan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menjelaskan, saat ini ETLE statis sudah terpasang di 57 titik ruas di Jakarta. Ditambahkan juga Polda Metro sudah menyiapkan 10 unit kendaraan ETLE mobile yang nantinya akan diluncurkan.

ETLE Mobile ini dirancang untuk melengkapi jalan yang tidak tercover ETLE statis.

"Di Mapolda juga kita siapkan, sehingga seluruh jalan yang ada di Jakarta ini sudah tercover oleh ETLE Mobile, kecuali 57 ETLE statis. Jadi jalan-jalan yang belum dicover ETLE statis dicover oleh ETLE mobile," ungkap Latif kepada wartawan, Jumat 28 Oktober 2022.



ETLE Mobile untuk setiap polres di Polda Metro Jaya akan diluncurkan dan mulai didistribusikan pada 6 Desember 2022. Dengan begitu, setiap pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE bakal diidentifikasi secara digital oleh petugas.

Jika terbukti melanggar, petugas akan langsung mencetak surat tilang dan dikirimkan ke alamat pelanggar melalui jasa kantor pos. "Jadi dengan adanya ETLE mobile ini sudah tidak ada penilangan manual seterusnya. Itu sudah kami laksanakan. Kami sudah siap untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri."

Lebih lanjut Latif menjelaskan, kendaraan ETLE mobile yang

akan diluncurkan itu nantinya bisa mengcapture beberapa pelanggaran yang sudah dilengkapi Artificial Intelligence (AI).

"Kendaraan ini mampu berkecepatan 05-40 Km/jam dapat mengcapture pelanggaran, karena ETLE Mobile ini sudah dilengkapi dengan AI," kata dia.

"Jadi pelanggaran yang sudah dilengkapi AI (misalnya) tidak menggunakan helm, sabuk pengaman menggunakan hp, melawan arus, rambu lalu lintas, boncong 3 dan ganjil genap."

Menurut Latif, dengan adanya ETLE mobile ini bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara dan bukan untuk ingin banyak menilang masyarakat.

"Kita berikan informasi ke masyarakat, edukasi masyarakat, bukan dengan adanya ETLE statis, ETLE mobile kami ingin banyak menilang itu tidak, tapi mari kita beraktifitas, produktifitas tanpa mengganggu keselamatan orang lain dan diri sendiri."

Ditlantas Polda Metro Jaya saat ini juga sudah menarik seluruh surat tilang dari anggota polantas mulai pekan ini. Polda Metro Jaya resmi menghentikan pelaksanaan tilang manual terhadap para pelanggar lalu lintas. Seluruh pengendara yang melanggar bakal ditindak secara elektronik. [*]





2022 BENDERA MERAH PUTIH DI PERBATASAN



Memperingati Hari Sumpah Pemuda Polres Bengkayang, Kodim dan Pemda Bengkayang menggelar Perhelatan Merah Putih Tapal Batas (MPTB) IV. Kegiatan tersebut melibatkan sedikitnya 1.500 bikers dari Kalimantan Barat, beberapa provinsi lain dan dari negara tetangga Malaysia. Ajang MPTB IV tersebut sekaligus memecahkan Rekor Muri dengan penancapan bendera Merah Putih di

perbatasan terbanyak sejumlah 2022 bendera. Bendera-bendera tersebut diberikan kepada Kapolres, Bupati, Forkompinda Kabupaten Bengkayang dan tamu undangan serta bikers dimulai dari Tugu Pancasila hingga ke Simpang 4 Take. Kapolres Bengkayang AKBP Bayu Suseno, mengapresiasi kegiatan ini yang meningkatkan semangat Nasionalisme di Tapal Batas Negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Tapal Batas adalah gerbang utama perbatasan sebagai beranda Negara Indonesia hendaknya semangat Nasionalisme masyarakat perbatasan tidak luntur untuk menjaga perbatasan dari ancaman-ancaman negara luar," kata Bayu Sabtu 29 Oktober 2022. Ia berharap momentum Merah Putih Tapal Batas (MPTB) IV ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang.

"Pengibaran bendera merah putih sebanyak 2022 buah ini sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia", kata dia. Bayu juga mengucapkan terima kasih atas piagam yang diberikan dan menjadi piagam ini sebagai motivasi untuk berkarya. Sementara itu Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan semangat cinta tanah air di perbatasan negara Malaysia di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. "Kegiatan ini bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Ke-94 tanggal 28 Oktober 2022. Merah Putih Tapal Batas di Kabupaten Bengkayang ini mempunyai momentum yang sangat penting bagi generasi-generasi muda dengan menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengibarkan bendera merah putih di Tapal Batas," kata dia. "Aksi ini bukan hanya untuk memecahkan rekor muri tetapi yang paling penting adalah untuk memperkuat semangat kebangsaan dengan tetap menjaga 4 pilar kebangsaan yakni UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." [*]



Niat Baik yang **Dituduh Pencitraan**

Sebuah keributan nampak di tepi jalan. Sebuah mobil terlihat berhenti, sementara di sekelilingnya warga tampak berkerumun. Usut punya usut, kerumunan bermula saat mobil itu tertabrak secara tidak sengaja oleh sebuah motor dari belakang.

Warga berkerumun karena mereka bersitegang soal ganti rugi.

Pemilik mobil meminta ganti rugi sebesar Rp 500 ribu kepada pemotor. Sementara si pemotor mengaku tidak sanggup untuk membayar dengan nominal yang diminta.

Seorang polisi kemudian datang dan menanyakan masalah yang terjadi. Ia mendapat penjelasan dari warga. "Ibu

mintanya Rp 500 ribu ya kan dari Rp 500 jadi Rp 300 ribu," kata salah satu warga.

Berikutnya, polisi itu kemudian mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya kepada seorang perempuan yang diduga merupakan pemilik mobil itu. Itu uang pribadi sang polisi.

Ketika memberikan uang itulah ia justru dituduh melakukan pencitraan. "Kok pencitraan? Tiga ratus ya? Sudah ya bu ya?," kata polisi tersebut sambil memberikan uang ke perempuan berbaju biru itu.

Setelah uang berpindah tangan, warga yang berkerumun memberikan tepuk tangan dan mengucapkan terima

kasih pada polisi tersebut. "Terima kasih Pak AKP," kata salah satu warga.

Belakangan diketahui polisi itu adalah AKP Fiat Ari Suhada yang kini menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Lebak, Polda Banten.

Fiat mengaku kaget dengan beredarnya video tersebut lantaran peristiwa tersebut terjadi saat Ramadhan 2022 beberapa bulan lalu. "Itu kejadiannya di Cilegon, paska Operasi Ketupat, saat arus mudik lebaran," kata Fiat, Selasa 25 Oktober 2022.

Ia bercerita peristiwa tersebut tidak direncanakan karena kebetulan dirinya tengah melintas dari Polda Banten

hendak ke Merak untuk memberikan laporan terkait arus mudik. Karena pada saat itu ada pengalihan arus lalu lintas, Fiat menggunakan sepeda motor ke Merak dan mendapati kerumunan warga itu.

"Saya tanya kenapa, akhirnya dijelaskan pemotor nabrak mobil, mereka sama-sama pemudik, si ibu minta ganti rugi seperti dalam video itu," kata Fiat.

Fiat kemudian menawarkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan urusan tersebut di kantor polisi. Keduanya menolak.

"Penyelesaiannya si ibu yang mobilnya ditabrak minta ganti rugi sejumlah uang, pemotor gak menyanggupi, hanya bisa sekitar Rp 300.000. Akhirnya ya sudahlah, daripada ngotot-ngotot, saya juga ada tugas lain, saya tanya ibu maunya berapa, maunya segitu, saya rogoh kantong, saya tambahkan," kata dia.

Masalah selesai dan ia melanjutkan perjalanan ke Merak.

Fiat mengaku tidak tahu menahu jika peristiwa tersebut ada yang merekam dan videonya kini viral di media sosial. Dia juga menampik jika aksinya tersebut merupakan pencitraan.

"Saya dibilang pencitraan, lho kok pencitraan, saya gak tau jika divideo, itu dari warga murni, saya enggak tahu viralnya sekarang," kata dia.

Fiat mengaku menanggapi viralnya video tersebut dengan santai. Namun demikian dia mengaku senang lantaran viral dalam hal yang positif.

"Awalnya biasa saja ya, karena bertugas mau ada kamera mau enggak, tugas kita salah satunya melindungi mengayomi masyarakat, kita lakukan dengan ikhlas saja, saya sebetulnya sudah lupa kok bisa muncul lagi. Alhamdulillah jika viralnya positif," kata dia. [*]



SISTEM GANJIL-GENAP BAKAL DITERAPKAN SELAMA KTT G20 DI BALI

Facebook DIVISI HUMAS POLRI
 Instagram DIVISIHUMASPOLRI
 TikTok DIVHUMAS_POLRI
 Twitter @DIVHUMAS_POLRI



INOVASI DIVHUMAS BIRO PENMAS POLRI MAJALAH TRIBRATA NEWS TERSEDIA ONLINE



www.humas.polri.go.id